



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

---

### **URGENSI PEMBANGUNAN UNIT PELAYANAN KEPEGAWAIAN (UPT) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

### **PEKERJAAN PEMBANGUNAN UNIT PELAYANAN KEPEGAWAIAN (UPT) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. GAMBARAN UMUM PROYEK .....</b>                                                                                                                             | <b>1</b>  |
| 1.1. KONDISI EKSISTING .....                                                                                                                                     | 3         |
| 1.2. KETERSEDIAAN TANAH DAN STATUS SERTIFIKAT .....                                                                                                              | 6         |
| <b>2. KAJIAN TEKNIS.....</b>                                                                                                                                     | <b>10</b> |
| 2.1. KONSEP DESAIN PROTOTYPE UNIT PELAYANAN KEPEGAWAIAN (UPT) BKN .....                                                                                          | 10        |
| 2.1.1. Landscape.....                                                                                                                                            | 10        |
| 2.1.2. Denah Lantai 1 .....                                                                                                                                      | 11        |
| 2.1.3. Denah Lantai 2 .....                                                                                                                                      | 12        |
| 2.1.4. Denah Lantai 3 .....                                                                                                                                      | 13        |
| 2.1.5. Detail Potongan.....                                                                                                                                      | 14        |
| 2.2. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) .....                                                                                                                          | 16        |
| 2.3. SKEMA PEMBIAYAAN DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB).....                                                                                                      | 16        |
| <b>3. KAJIAN EKONOMI .....</b>                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 3.1. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN NEGARA .....                                                                                                                  | 17        |
| 3.2. MENINGKATKAN POTENSI PENDAPATAN NEGARA YANG BERASAL DARI KEGIATAN<br>YANG MENJADI TUGAS FUNGSI UNIT PELAYANAN KEPEGAWAIAN (UPT) BKN.....                    | 22        |
| 3.2.1. Pelaksanaan Penilaian Kompetensi .....                                                                                                                    | 22        |
| 3.2.2. Pelaksanaan Sekolah kedinasan.....                                                                                                                        | 24        |
| 3.3. MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN BAGI MASYARAKAT SEKITAR DAN MEMACU<br>KEGIATAN EKONOMI PADA WILAYAH SEKITAR KANTOR UNIT PELAYANAN KEPEGAWAIAN<br>(UPT) BKN ..... | 25        |
| <b>4. KAJIAN KELEMBAGAAN .....</b>                                                                                                                               | <b>26</b> |
| <b>5. KAJIAN RISIKO .....</b>                                                                                                                                    | <b>35</b> |
| <b>6. KAJIAN POTENSI PEMANFAATAN .....</b>                                                                                                                       | <b>37</b> |

# **STUDI KELAYAKAN DAN URGENSI**

## **PEMBANGUNAN UNIT PELAYANAN KEPEGAWAIAN (UPT)**

### **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

#### **1. Gambaran Umum Proyek**

Dalam rangka mengemban amanah Undang-Undang ASN Nomor 5 tahun 2014, visi BKN tahun 2020-2024 sejalan dengan Visi Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Terpercaya” dengan melaksanakan arahan Presiden nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan agenda pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu “Memperkuat stabilitas polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan ***“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berkualitas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***”.

Sesuai amanat UU ASN Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki tugas diantaranya :

1. Mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;
2. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah; dan
3. Menyenggarakan administrasi kepegawaian ASN;

Seleksi Calon Pegawai ASN merupakan langkah pertama dan menjadi bagian penting dalam rangkaian proses Manajemen ASN, pada tahapan ini merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan pada proses manajemen ASN selanjutnya. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang *capable* sesuai dengan target area perubahan sumber daya manusia aparatur diperlukan adanya sistem dan pelaksanaan seleksi yang handal dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Pelaksanaan tugas pembina dan penyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah memegang peranan penting dalam reformasi birokrasi terutama dalam penerapan *merit system*. Manfaat pelaksanaan tugas ini melalui

*Assessment Center* BKN diantaranya adalah seleksi promosi dan rotasi, identifikasi gap dan pengembangan kompetensi, identifikasi kader kepemimpinan (*talent management*).

Pelaksanaan tugas Administrasi Kepegawaian ASN diantaranya a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil; c. perumusan pertimbangan teknis perencanaan di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil; d. pelaksanaan administrasi pensiun Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara; e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil. Keseluruhan fungsi pelaksanaan tugas administrasi tersebut merupakan hak ASN yang harus dipenuhi dalam usaha peningkatan kinerja ASN.

Mengingat keberadaan ASN dan masyarakat yang berminat menjadi ASN menyebar diseluruh indonesia idealnya dalam setiap provinsi memiliki Kantor perwakilan BKN untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan. Pembangunan Kantor UPT tersebut juga mendapat dukungan penuh oleh pemerintah provinsi, hal tersebut diwujudkan diantaranya dengan pemberian hibah tanah dan pemberian pinjaman gedung sementara.

Pada saat ini BKN saat ini memiliki 21 UPT yang tersebar di beberapa provinsi. Gedung UPT BKN masih berstatus pinjam pakai, hanya satu UPT yang sudah dibangun pada tahun 2015 yaitu UPT Bengkulu di Provinsi Bengkulu. Sebanyak 9 (Sembilan) Tanah lokasi Kantor UPT yang status tanahnya sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Kepegawaian Negara, 5 lokasi UPT yang masih dalam proses hibah, 6 lokasi UPT lain yang status gedung masih pinjam pakai.

Pada tahun 2024 melalui pembiayaan SBSN, BKN melaksanakan pembangunan pada 2 lokasi yaitu Unit Pelayanan Kepegawaian Gorontalo dan Unit Pelayanan Kepegawaian Mataram. Pembangunan tersebut harus tetap dilanjutkan, mengingat dengan kondisi sarana prasarana UPT yang terbatas seperti saat ini menimbulkan permasalahan di luar kendali BKN dalam

menyelenggarakan fungsi dan memberikan pelayanan kepada stakeholder, diantaranya:

- a. Keamanan Pelaksanaan CASN dari sisi Teknologi Informasi;
- b. Kondisi Gedung yang tidak memadai (keamanan, aksesibilitas, sirkulasi, kenyamanan). Sehingga BKN tidak dapat menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

Pada tahun 2025 melalui skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), BKN mengajukan pembangunan Unit Pelayanan Kepegawaian (UPT) di 4 wilayah antara lain UPT BKN Bandung, UPT BKN Banjarmasin, UPT BKN Jambi dan UPT BKN Pangkal Pinang. Kedepannya tidak menutup kemungkinan UPT ini akan menjadi Kantor Regional sesuai dengan perubahan dan tuntutan kebutuhan. Oleh sebab itu hadirnya Unit Pelayanan Kepegawaian (UPT) BKN di setiap provinsi diharapkan dapat mendekatkan pelayanan BKN dalam penyelenggaraan manajemen ASN.

### **1.1. Kondisi Eksisting**

Status Gedung yang saat ini digunakan merupakan izin pinjam pakai dari Pemerintah daerah setempat dengan kondisi yang dibawah standar gedung kantor pelayanan Kepegawiaian sebagaimana tercantum dibawah ini.

#### **1. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Bandung**



#### **2. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Banjarbaru**



### 3. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Jambi



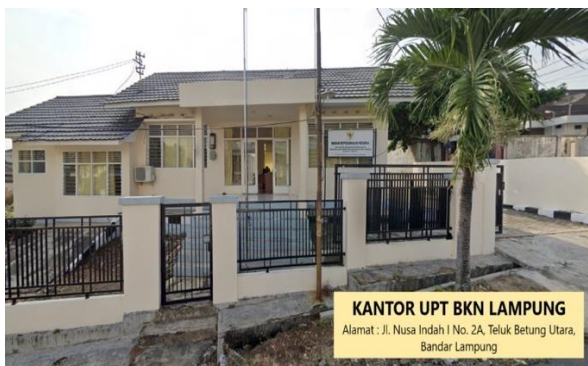
### 4. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Pangkal Pinang



### 5. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Kupang



### 6. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Lampung

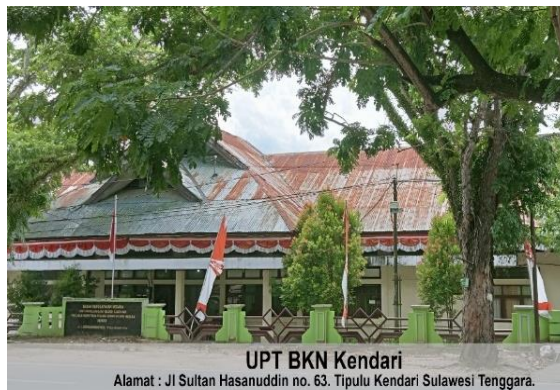




7. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Sorong



8. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Kendari



9. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Donggala



10. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Ternate



## 1.2. Ketersediaan Tanah dan Status Sertifikat

Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana Gedung Pelayanan Kepegawaian BKN dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu:

| No | Lokasi UPT             | Rencana Pembangunan (Tahun) | Status Tanah       | Status Anggaran          |
|----|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1  | UPT BKN Jambi          | 2025                        | Sertifikat Cq. BKN | Disetujui (No. BA:088)   |
| 2  | UPT BKN Pangkal Pinang |                             | Sertifikat Cq. BKN | Disetujui (No. BA:088)   |
| 3  | UPT BKN Bandung        |                             | Sertifikat Cq. BKN | Ditunda Tahun Berikutnya |
| 4  | UPT BKN Banjarbaru     |                             | Sertifikat Cq. BKN | Ditunda Tahun Berikutnya |
| 5  | UPT BKN Kupang         | 2026                        | Sertifikat Cq. BKN | -                        |
| 6  | UPT BKN Ternate        |                             | Sertifikat Cq. BKN | -                        |
| 7  | UPT BKN Sorong         |                             | Sertifikat Cq. BKN | -                        |
| 8  | UPT BKN Kendari        |                             | Sertifikat Cq. BKN | -                        |
| 9  | UPT BKN Donggala       | 2027                        | Sertifikat Cq. BKN | -                        |
| 10 | UPT BKN Lampung        |                             | -                  | -                        |

Lokasi Tanah Rencana Pembangunan Pelayanan Kepegawaian BKN :

### 1. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Bandung

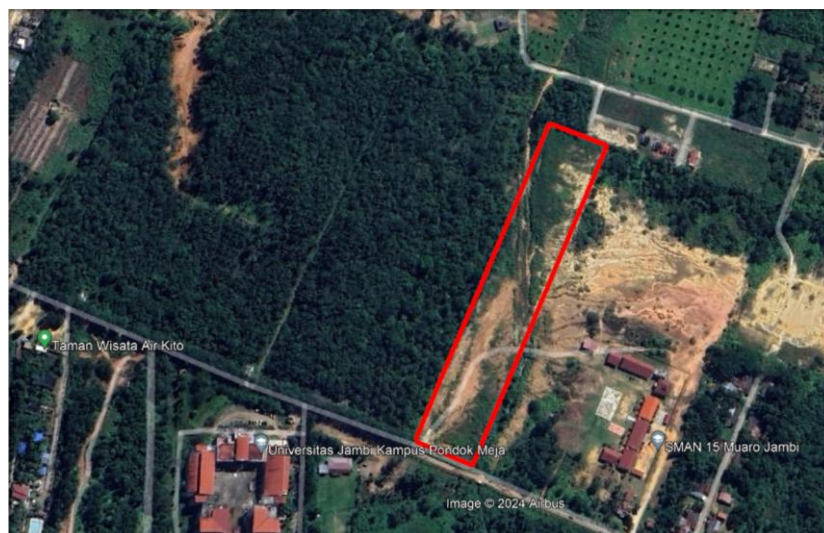




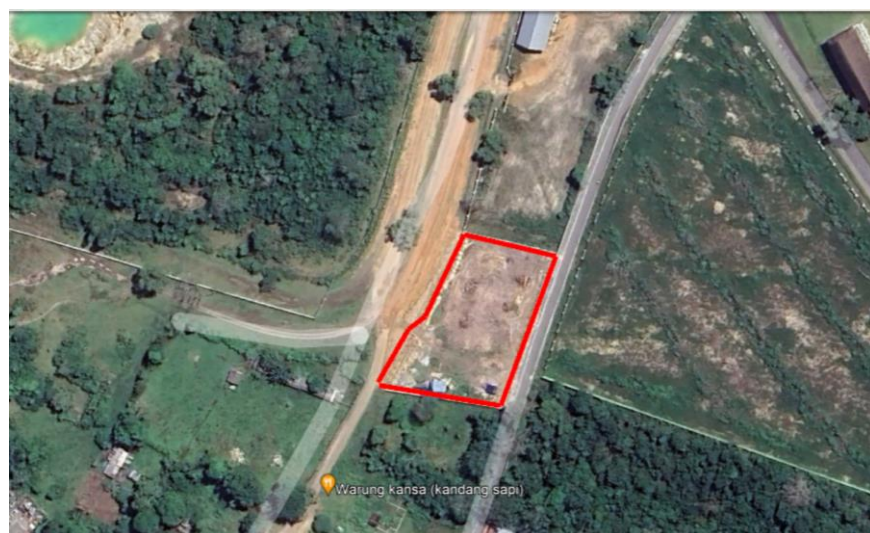
## 2. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Banjarbaru



## 3. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Jambi

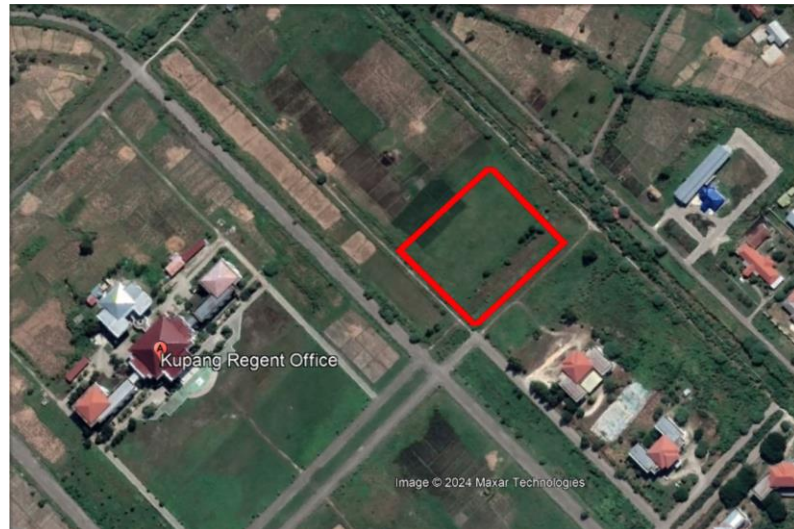


## 4. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Pangkal Pinang





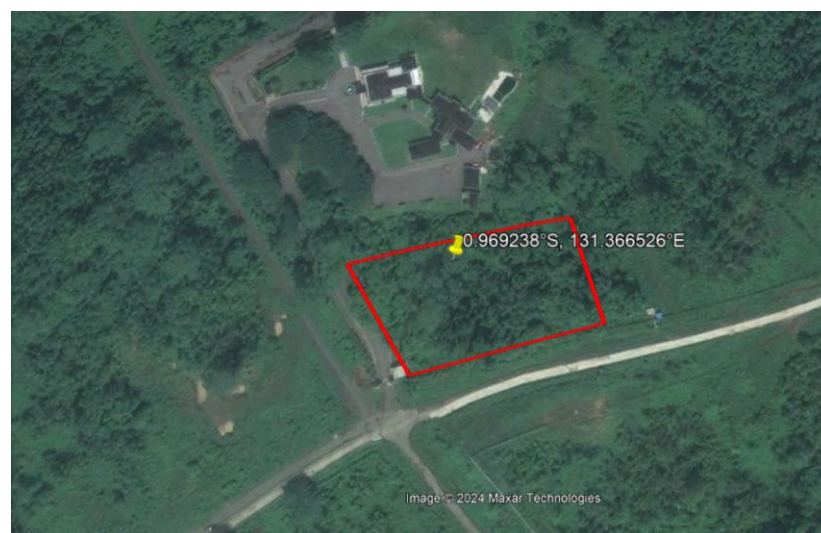
## 5. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Kupang



## 6. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Lampung

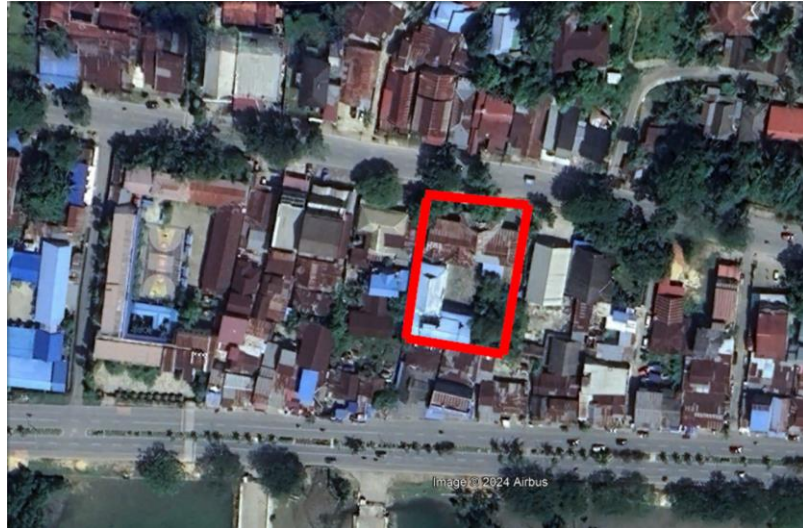


## 7. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Sorong

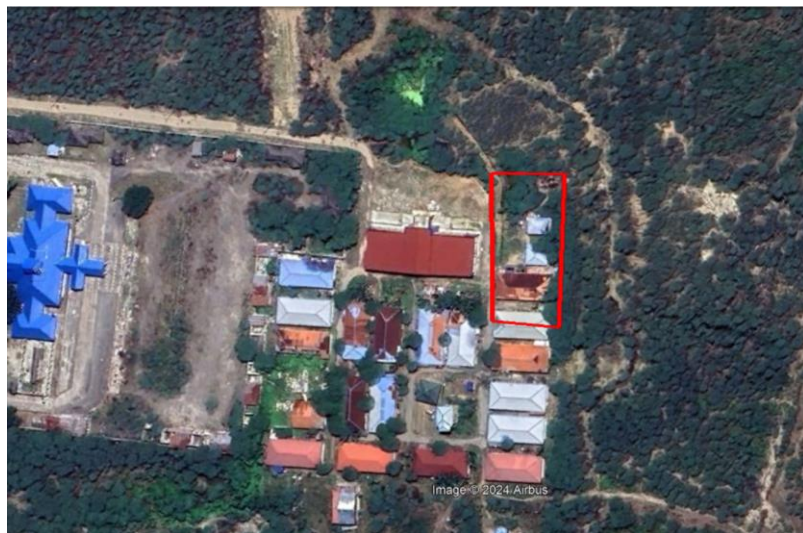




#### 8. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Kendari



#### 9. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Donggala



#### 10. Kantor Pelayanan Kepegawaian BKN Ternate



## 2. Kajian Teknis

Adapun kajian teknis dari pembangunan Unit Pelayanan Kepegawaian (UPT) BKN ini dijelaskan dalam sub bagian berikut ini.

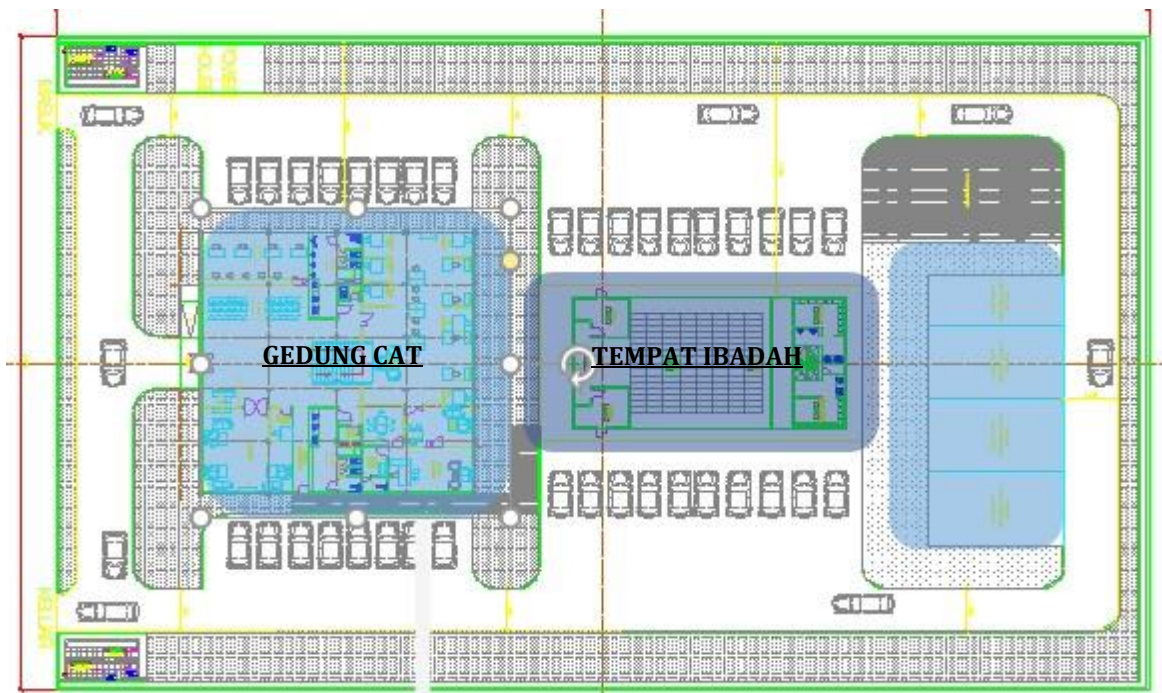
### 2.1. Konsep Desain *Prototype* Unit Pelayanan Kepegawaian (UPT)

#### BKN

Desain *prototype* Unit Pelayanan Kepegawaian (UPT) ini merupakan desain yang telah dibangun di UPT Bengkulu pada tahun 2017, secara umum keseluruhan lahan yang dimiliki BKN dari hibah Pemerintah daerah dapat dibangun dengan konsep perencanaan ini. Penyesuaian dibutuhkan dalam perhitungan struktur gedung yang perlu disesuaikan dengan kondisi tanah dan zonasi gempa.

#### 2.1.1. Landscape

Secara garis besar, keseluruhan lahan hibah yang dimiliki BKN dapat dibangun dengan konsep *landscape* seperti gambar dibawah ini. Setiap kantor Unit Pelayanan Kepegawaian (UPT) diusulkan memiliki fasilitas umum berupa tempat ibadah.

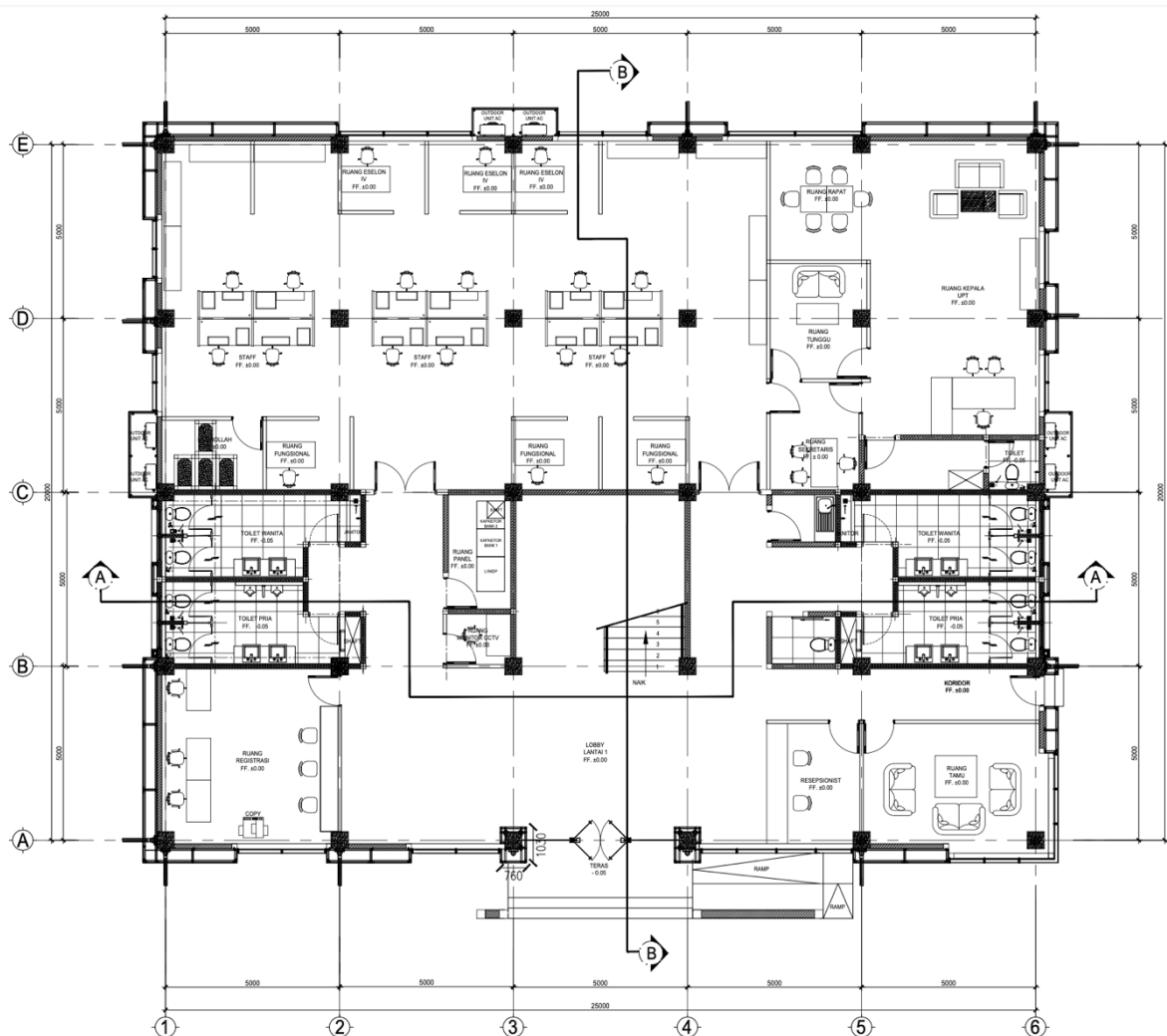




### 2.1.2. Denah Lantai 1

Peruntukan lantai 1 adalah untuk perkantoran pegawai Unit Pelayanan Kepegawaian (UPT), disisi lain posisi kantor di lantai 1 memudahkan pengawasan pada saat pelaksanaan seleksi. Secara keseluruhan tapak ukuran Gedung Unit Pelayanan Kepegawaian (UPT) adalah 20m x 25m atau sekitar 500m<sup>2</sup> per lantai, dan 1500m<sup>2</sup> untuk 3 lantai.

Beberapa fasilitas didalamnya diantaranya ruang Kepala UPT, ruang kerja pegawai, ruang rapat dan ruangan pelayanan kepegawaian.

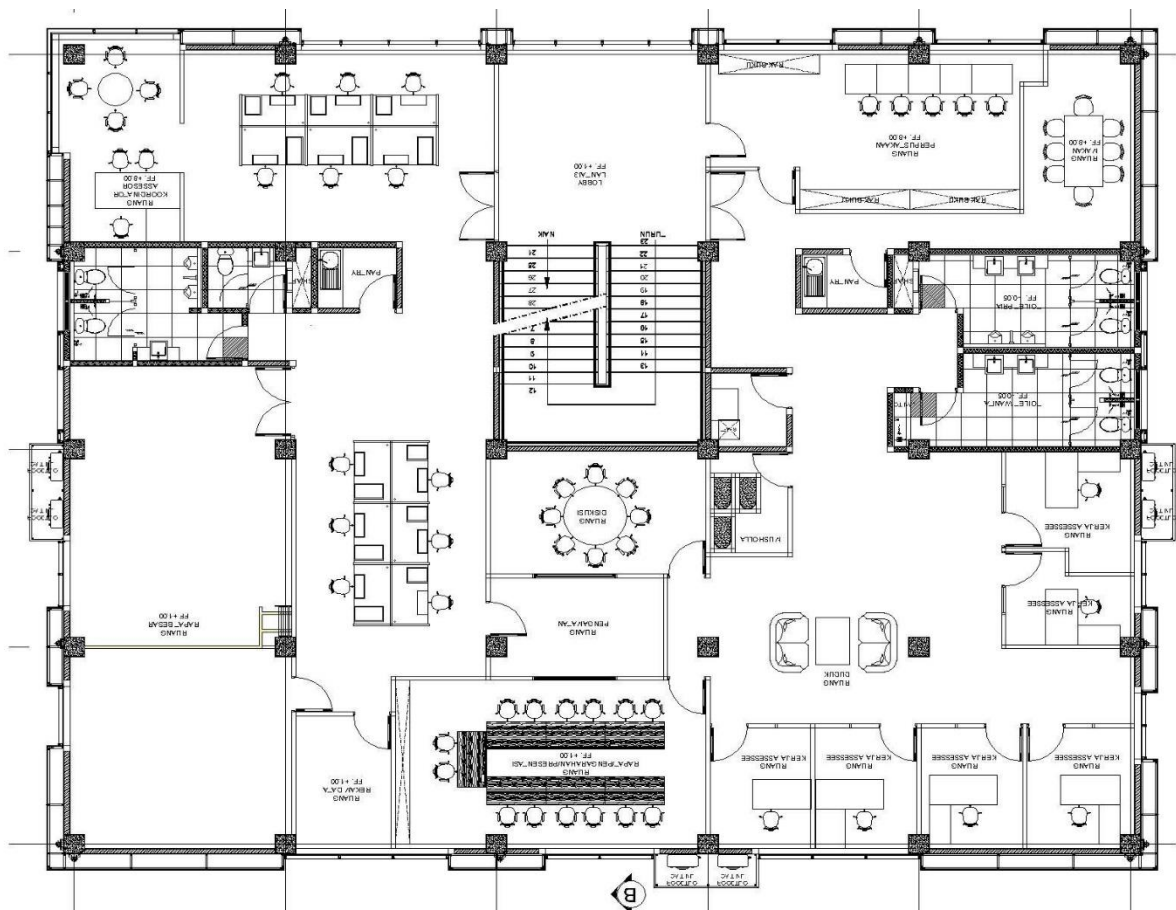




### 2.1.3. Denah Lantai 2

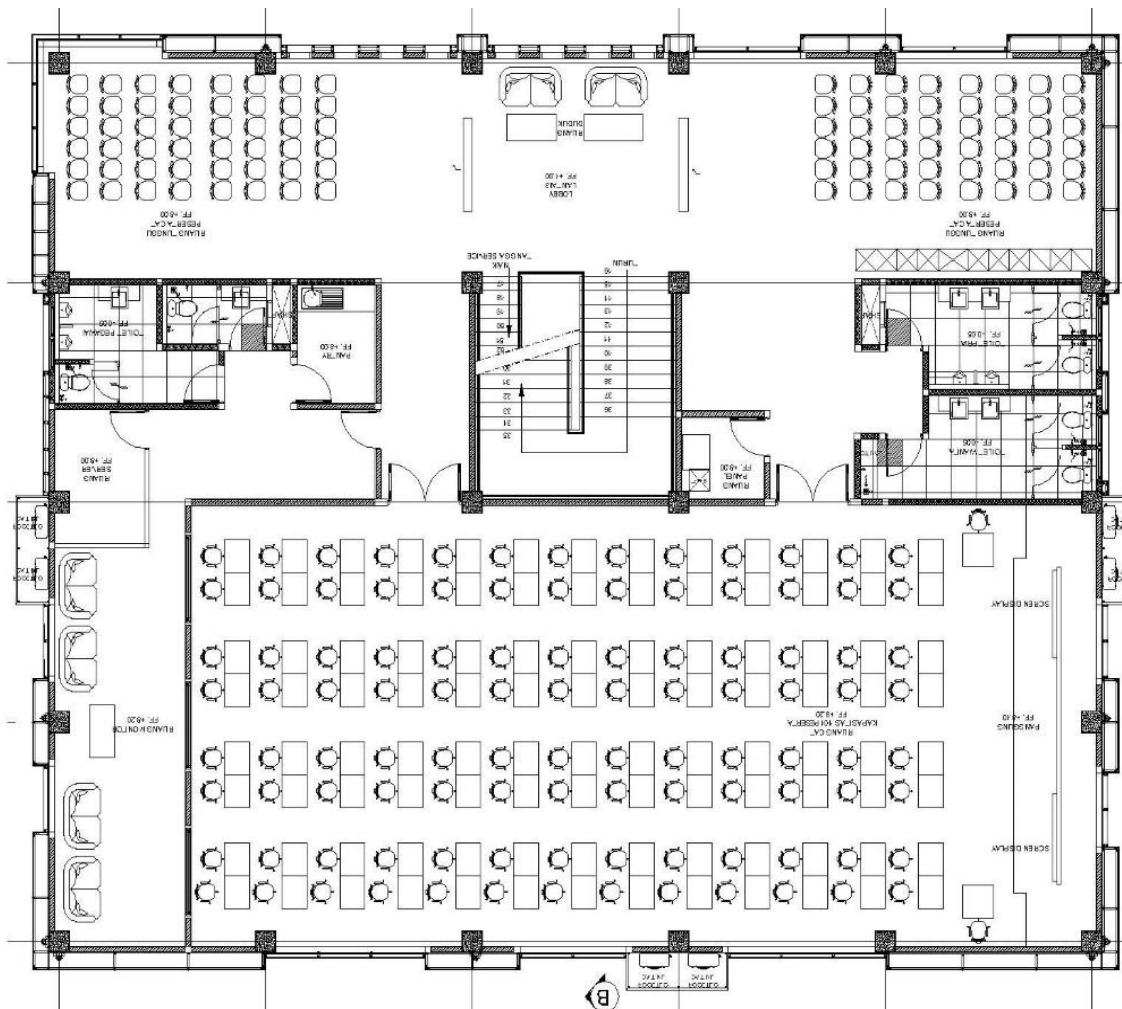
Lantai 2 diperuntukan untuk *Ruang Assessment Center* 1 batch untuk 6 peserta. Ruangan di lantai 2 terdiri dari ruang *Assessee*, Asesor beserta fasilitas dan kelengkapannya.

Ruangan *Assesment Center* memerlukan ruang monitoring khusus untuk memantau peserta *assessment*, dibutuhkan adanya CCTV untuk memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh *assessee*. Meski pun dalam satu ruangan, interaksi antara Asesor dan *Assessee* dibatasi sehingga diperlukan akses kontrol pada setiap akses diruangan ini.

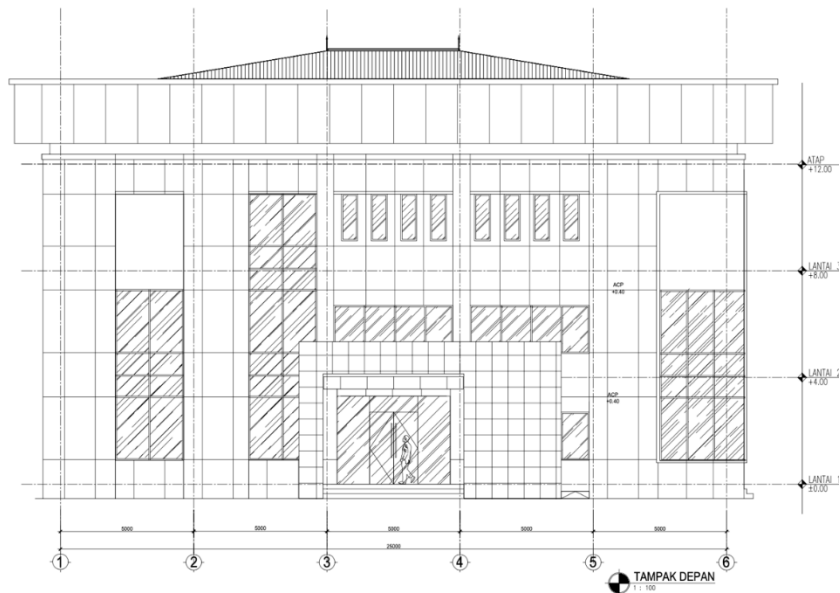


#### 2.1.4. Denah Lantai 3

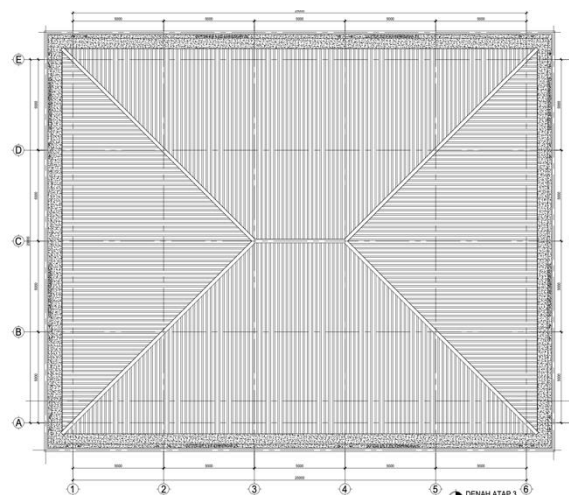
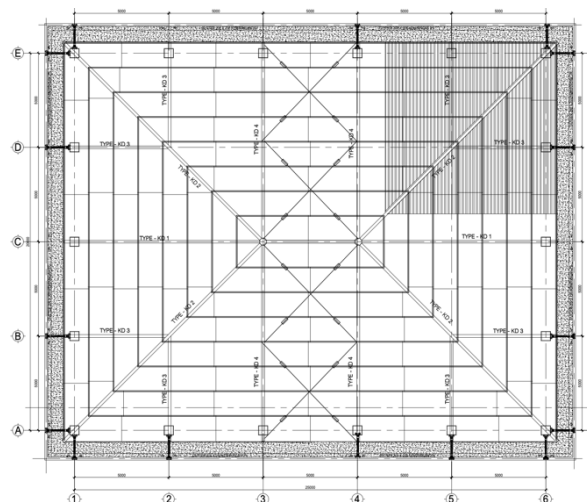
Lantai 3 pada Unit Pelayanan Kepegawaian (UPT) difungsikan untuk ruang Tes CAT dengan kapasitas 100 peserta. Ruang Tes CAT memiliki spesifikasi yang berbeda dengan ruang kerja, material lantai yang dipergunakan adalah jenis *raised floor* untuk keamanan peserta. Ruang Tes CAT terdiri dari beberapa ruangan penunjang diantaranya ruang monitoring yang digunakan untuk pengamatan peserta tes yang dilengkapi dengan peralatan CCTV.



## 2.1.5. Detail Potongan

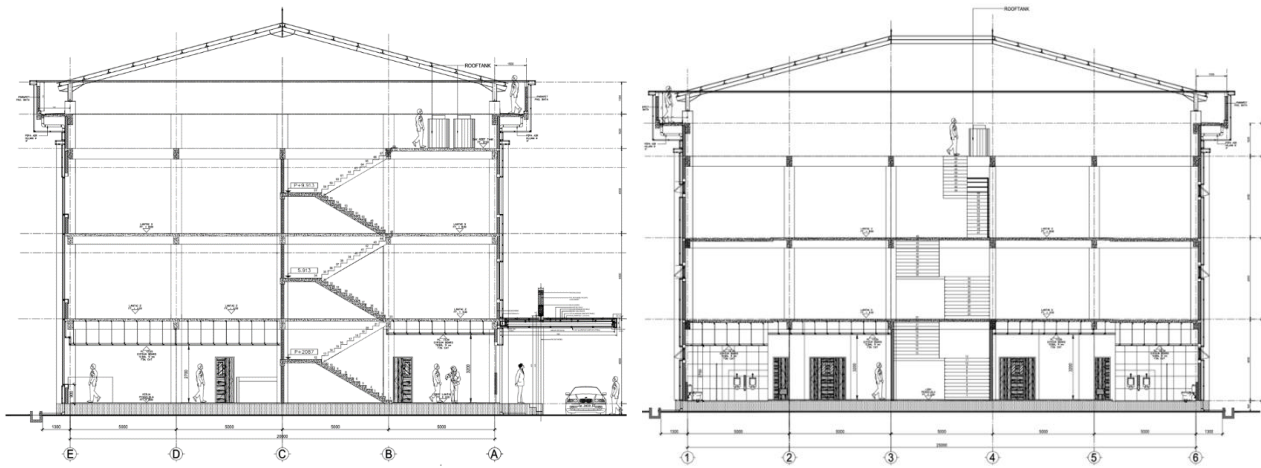


**Gambar Tampak Depan**

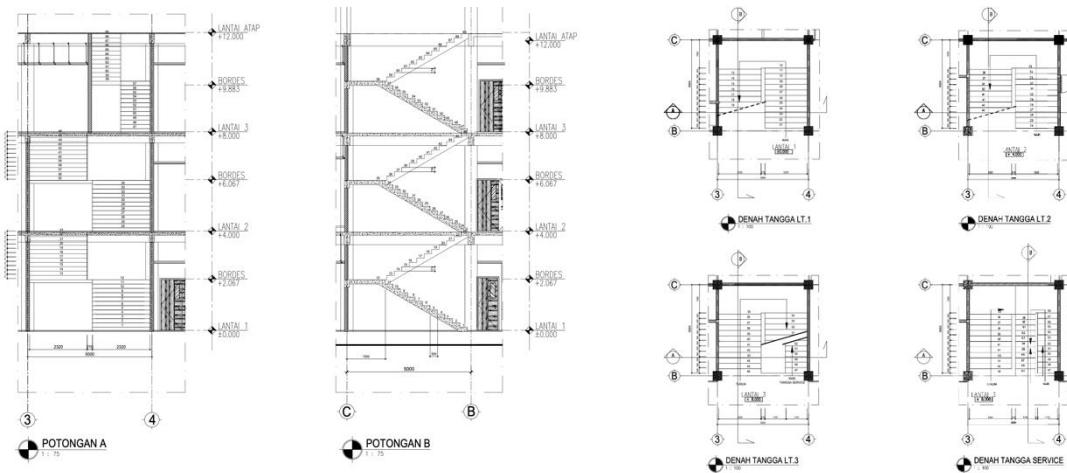


**Gambar Denah Atap**





**Gambar Potongan Gedung**



**Gambar Potongan Tangga**

## 2.2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

**Tabel Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran**

| Lokasi            | Biaya<br>Konstruksi<br>dengan IKK<br>BPS | Biaya<br>Perencanaan<br>Konstruksi | Biaya<br>Pengawasan<br>Konstruksi | Biaya<br>Pengelolaan<br>Kegiatan | Biaya<br>Peralatan dan<br>ongkos kirim | Jumlah            |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|                   | 1                                        | 2                                  | 3                                 | 4                                | 5                                      | 6 = 1+2+3+4+5     |
| Bandung           | 31.384.752.000,00                        | 1.987.279.000,00                   | 1.232.744.000,00                  | 344.556.000,00                   | 5.641.089.000,00                       | 40.590.420.000,00 |
| Banjarbaru        | 28.473.255.000,00                        | 1.867.737.000,00                   | 1.131.772.000,00                  | 325.881.000,00                   | 6.044.958.000,00                       | 37.843.603.000,00 |
| Jambi             | 26.032.530.000,00                        | 1.757.056.000,00                   | 1.044.811.000,00                  | 308.090.000,00                   | 5.843.847.000,00                       | 34.986.334.000,00 |
| Pangkal<br>Pinang | 29.173.808.000,00                        | 1.897.594.000,00                   | 1.156.222.000,00                  | 330.604.000,00                   | 5.835.236.000,00                       | 38.393.464.000,00 |
| TOTAL BIAYA       |                                          |                                    |                                   |                                  | 151.813.821.000,00                     |                   |

Berdasarkan rincian kebutuhan anggaran pembangunan gedung dan sarana dan prasarana pendukung, kebutuhan biaya untuk pembangunan Unit Pelayanan Kepegawaian (UPT) adalah sebesar **Rp. 151.813.821.000,00**

## 2.3. Skema Pembiayaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Pada tahun 2024 BKN mengajukan pendanaan untuk empat lokasi yaitu Bandung, Banjarbaru, Jambi dan pangkal pinang, namun yang disetujui pendanaanya hanya dua lokasi yaitu Jambi dan Pangkal Pinang. Skema pembiayaan pembangunan Gedung Pelayanan Kepegawaian BKN Jambi dan Pangkal Pinang adalah melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tahun 2025 Sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif Belanja K/L dan dana alokasi khusus 2024 Kementrian Keuangan.

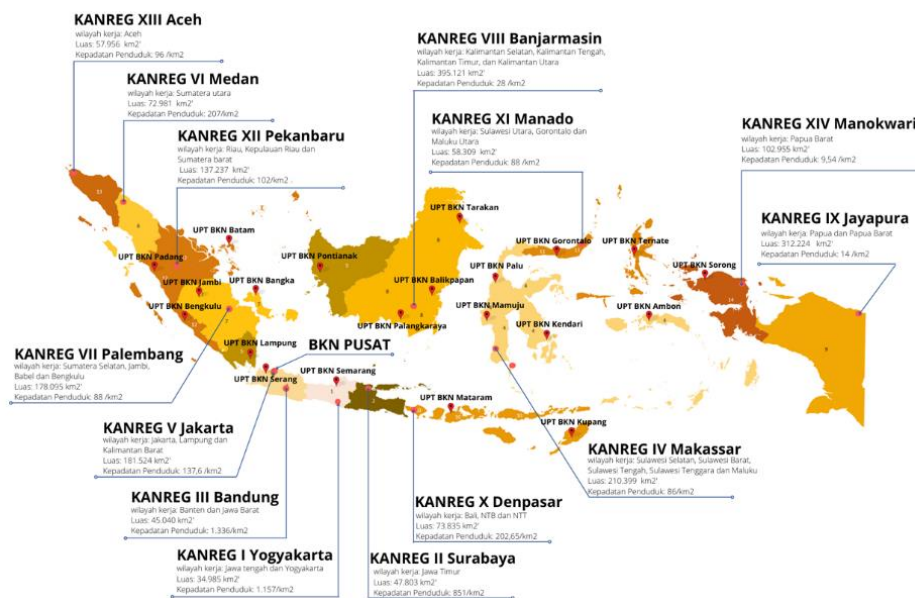
| DAFTAR RINCIAN PROYEK SBSN SEBAGAI BAHAN PAGU INDIKATIF APBN TA 2025 |                                |                                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| No.                                                                  | K/L - Unit Eselon I            | NAMA PROYEK/KEGIATAN               | USULAN PAGU INDIKATIF |
|                                                                      | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) |                                    | 73.379.798.000        |
|                                                                      | Sestama BKN                    |                                    | 73.379.798.000        |
| 1                                                                    |                                | Pembangunan UPT BKN Jambi          | 34.986.334.000        |
| 2                                                                    |                                | Pembangunan UPT BKN Pangkal Pinang | 38.393.464.000        |

### 3. Kajian Ekonomi

Pembangunan infrastruktur dalam suatu wilayah memberikan peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di wilayah tersebut. Pembangunan Kantor Unit Pelayanan Kepegawaian (UPT) BKN di Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Jambi dan Bangka Belitung diharapkan mampu memberikan manfaat tidak hanya kepada ASN yang merupakan *stakeholder* utama BKN, tetapi juga dapat memberikan dampak yang optimal terhadap masyarakat dan negara diantaranya:

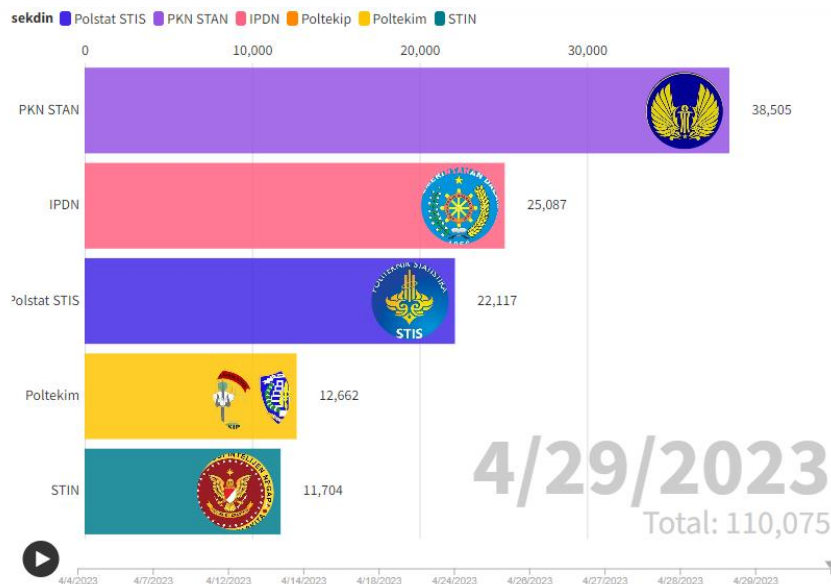
1. Efisiensi penggunaan Anggaran Negara;
2. Meningkatkan potensi pendapatan negara yang berasal dari Kegiatan yang menjadi tugas fungsi UPT;
3. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan Memacu kegiatan ekonomi pada wilayah sekitar kantor UPT.

#### 3.1. Efisiensi Penggunaan Anggaran Negara



Antusiasme masyarakat yang besar untuk menjadi ASN baik melalui jalur PPPK, Sekolah Ikatan Dinas dan CASN sangat tinggi, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri terhadap pemenuhan target kinerja BKN yang semakin meningkat, kondisi saat ini BKN memiliki 13 kantor Regional dan 21 kantor UPT yang tersebar diseluruh Indonesia tentu saja hal ini tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat umum apabila mengandalkan sarana dan prasarana yang dimiliki BKN. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut sebagian besar titik lokasi tes diluar kantor BKN melalui program sewa sarana dan prasarana.





Grafik di atas adalah jumlah peserta tes Sekolah Kendinasan tahun 2023 yang dilaksanakan di Provinsi Jambi dilakukan analisa perbandingan biaya antara membangun gedung baru dan menyewa sarana prasana seperti yang dilakukan sekarang. Data- data yang dipergunakan dalam analisa diantaranya:

1. Biaya realisasi pelaksanaan tes PPPK, CPNS, Sekolah Kedinasan tahun 2023
2. Keputusan Menteri Keuangan No.295/KM 6/ 2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara
3. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan UPT tahun 2024 (biaya renovasi setiap 5 tahun 25%)
4. Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Pendukung dan Sarana Prasarana Kantor dan biaya pengiriman tahun 2024 (peralatan diganti sesuai masa manfaat)
5. Perhitungan Penggunaan Biaya Listrik Tambahan selama pelaksanaan Tes
6. Asumsi pelaksanaan tes dilaksanakan sepanjang tahun di Kantor Pelayanan



## Keputusan Menteri Keuangan No.295/KM 6/ 2019



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

| KODE BARANG    | URAIAN                                  | UMUR / MASA MANFAAT |          |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------|----------|
|                |                                         | Tahun               | Semester |
| 3 09 02 00 000 | PERSENJATAAN NON SENJATA API            | 3                   | 6        |
| 3 09 03 00 000 | SENJATA SINAR                           | 5                   | 10       |
| 3 09 04 00 000 | ALAT KHUSUS KEPOLISIAN                  | 4                   | 8        |
| 3 10 00 00 000 | KOMPUTER                                |                     |          |
| 3 10 01 00 000 | KOMPUTER UNIT                           | 4                   | 8        |
| 3 10 02 00 000 | PERALATAN KOMPUTER                      | 4                   | 8        |
| 3 11 00 00 000 | ALAT EKSPLORASI                         |                     |          |
| 3 11 01 00 000 | ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI               | 5                   | 10       |
| 3 11 02 00 000 | ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA               | 10                  | 20       |
| 3 12 00 00 000 | ALAT PENGEBORAN                         |                     |          |
| 3 12 01 00 000 | ALAT PENGEBORAN MESIN                   | 10                  | 20       |
| 3 12 02 00 000 | ALAT PENGEBORAN NON MESIN               | 10                  | 20       |
| 3 13 00 00 000 | ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN |                     |          |
| 3 13 01 00 000 | SUMUR                                   | 10                  | 20       |
| 3 13 02 00 000 | PRODUKSI                                | 10                  | 20       |
| 3 13 03 00 000 | PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN                | 15                  | 30       |
| 3 14 00 00 000 | ALAT BANTU EKSPLORASI                   |                     |          |
| 3 14 01 00 000 | ALAT BANTU EKSPLORASI                   | 10                  | 20       |
| 3 14 02 00 000 | ALAT BANTU PRODUKSI                     | 10                  | 20       |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-12-

| KODE BARANG    | URAIAN                                | JENIS    | PERSENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN) | PENAMBAHAN MASA MANFAAT |          |
|----------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|                |                                       |          |                                                                                 | TAHUN                   | SEMESTER |
| 4 01 01 00 000 | BANGUNAN GEDUNG<br>TEMPAT KERJA       | Renovasi | > 0% s.d. 25%                                                                   | 5                       | 10       |
|                |                                       |          | > 25% s.d. 50%                                                                  | 10                      | 20       |
|                |                                       |          | > 50% s.d. 75%                                                                  | 15                      | 30       |
|                |                                       |          | > 75% s.d. 100%                                                                 | 50                      | 100      |
| 4 01 02 00 000 | BANGUNAN GEDUNG<br>TEMPAT TINGGAL     | Renovasi | > 0% s.d. 30%                                                                   | 5                       | 10       |
|                |                                       |          | > 30% s.d. 45%                                                                  | 10                      | 20       |
|                |                                       |          | > 45% s.d. 65%                                                                  | 15                      | 30       |
| 4 02 00 00 000 | MONUMEN                               |          |                                                                                 |                         |          |
| 4 02 01 00 000 | CANDI/TUGU<br>PERINGATAN/PRASA<br>STI | Renovasi | > 0% s.d. 30%                                                                   | 5                       | 10       |
|                |                                       |          | > 30% s.d. 45%                                                                  | 10                      | 20       |
|                |                                       |          | > 45% s.d. 65%                                                                  | 15                      | 30       |
| 4 03 00 00 000 | BANGUNAN MENARA                       |          |                                                                                 |                         |          |
| 4 03 01 00 000 | BANGUNAN MENARA<br>PERAMBUN           | Renovasi | > 0% s.d. 30%                                                                   | 5                       | 10       |
|                |                                       |          | > 30% s.d. 45%                                                                  | 10                      | 20       |

# Membangun ? atau Menyewa ?

## TABEL PERBANDINGAN



### MEMBANGUN GEDUNG

Lingkup pembangunan Gedung ini termasuk dengan pengadaan sarana prasarana dan termasuk fasilitas CAT, Assesment Center, Pelayanan Kepegawaian



### MENYEWA GEDUNG

Lingkup sewa sarana prasarana ini adalah Gedung, peralatan utama berupa computer dll, peralatan pendukung dsb

·Kapasitas 100  
·4 sesi / hari  
·R.CAT  
·R. Assesment  
·R. Pelayanan

### SPESIFIKASI



·Kapasitas 100  
·4 sesi / hari  
·Biaya / hari  
·R.CAT

Setelah dilakukannya pembangunan maka gedung dan sarana pendukung menjadi **ASET** kepemilikan BKN

### KEPEMILIKAN



Sewa hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu tertentu

Dengan biaya yang dikeluarkan sebesar **34 Milyar** maka akan menjadi aset dan dapat digunakan kembali untuk kegiatan selanjutnya tanpa harus menyewa

### BIAYA



Dengan biaya yang dikeluarkan sebesar **83 Juta /hari (100pc)**

### Rincian Sewa

1. Sewa Gedung
2. Sewa PC
3. Sewa Jaringan Data
4. Sewa Jaringan Listrik
5. Sewa tenda
6. Sewa metal detector
7. Sewa gensetm toilet
8. AC Standing/Kipas
9. Sewa meja kursi
10. Sewa LCD dan Sound portable

- Jumlah hari 35 hari
- Total 35x83jt = 2,9M/tahun

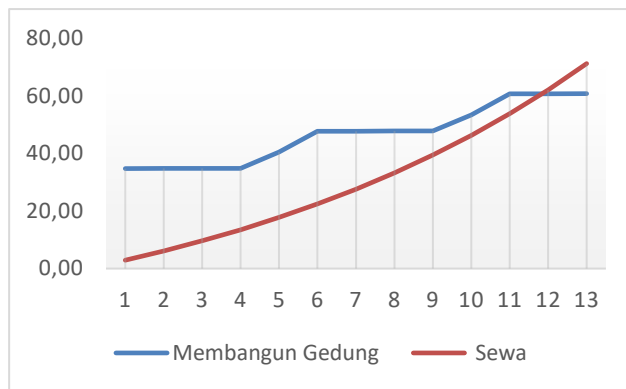
### Rincian Pembangunan

- Gedung Utama 1500 m2
- Bangunan pendukung
- Lt 1 staff dan Pelayanan
- Lt 2 Assesment Center
- Lt 3 CAT
- PC,Genset,UPS,Jaringan, Sarpras

Dengan kapasitas 100 orang biaya perhari adalah 83 jt rupiah

- Peserta CPNS 4263 Peserta
- Peserta PPPK 4039 Peserta
- Peserta Sekdin 2063 Peserta
- Kapasitas 100 pc
- 3 sesi/hari





Grafik Perbandingan Bangun dengan Sewa

## Data Dasar Perhitungan

| Bangun                                                                                                                                                                                        | Sewa                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Total Biaya 29,14 M</li> <li>Biaya renovasi per 5 th 25%</li> <li>Ganti baru peralatan per 4 th</li> <li>Biaya op listik 22jt/th (akbt tes)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya sewa 83 jt/hari</li> <li>Eskalasi sewa 10% per tahun</li> <li>35 hari untuk 11 ribu peserta per tahun</li> </ul> |

| Tahun ke- | Membangun Gedung |                  | Biaya Operasional / Penyusutan |                     |                            | Total Bangun (Milyar) | Sewa (Milyar) | Komulatif Sewa (Milyar) |
|-----------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|           | Gedung (Milyar)  | Sarpras (Milyar) | Gedung                         |                     | Peralatan Sarpras (Milyar) |                       |               |                         |
|           |                  |                  | Operasional (Milyar)           | Penyusutan (Milyar) |                            |                       |               |                         |
|           |                  |                  |                                |                     |                            |                       |               |                         |
| 1         | 29,14            | 5,61             | -                              | -                   | -                          | 34,75                 | 2,91          | 2,91                    |
| 2         | 29,14            | 5,61             | 0,02                           | -                   | -                          | 34,77                 | 3,20          | 6,10                    |
| 3         | 29,14            | 5,61             | 0,04                           | -                   | -                          | 34,79                 | 3,52          | 9,62                    |
| 4         | 29,14            | 5,61             | 0,06                           | -                   | -                          | 34,81                 | 3,87          | 13,48                   |
| 5         | 29,14            | 11,22            | 0,08                           | -                   | 5,61                       | 40,44                 | 4,25          | 17,74                   |
| 6         | 36,43            | 11,22            | 0,11                           | 7,29                | -                          | 47,75                 | 4,68          | 22,41                   |
| 7         |                  |                  |                                |                     |                            |                       |               |                         |
| 8         |                  |                  |                                |                     |                            |                       |               |                         |
| 9         |                  |                  |                                |                     |                            |                       |               |                         |
| 10        |                  |                  |                                |                     |                            |                       |               |                         |
| 11        | 43,71            | 16,83            | 0,21                           | 7,29                | -                          | 60,75                 | 7,53          | 53,83                   |
| 12        | 43,71            | 16,83            | 0,23                           | -                   | -                          | 60,77                 | 8,29          | 62,12                   |
| 13        | 43,71            | 16,83            | 0,25                           | -                   | -                          | 60,79                 | 9,12          | 71,24                   |

Berdasarkan hasil analisa diatas, dari grafik perhitungan dapat disimpulkan bahwa pada tahun ke delapan dan seterusnya membangun akan lebih efisien apabila dibandingkan dengan menyewa. Pelaksanaan seleksi yang dilaksanakan setiap tahun akan mengalami kenaikan biaya akibat inflasi dan hal lain seperti modernisasi peralatan.

### 3.2. Meningkatkan potensi pendapatan negara yang berasal dari Kegiatan yang menjadi tugas fungsi Unit Pelayanan Kepegawaian (UPT) BKN

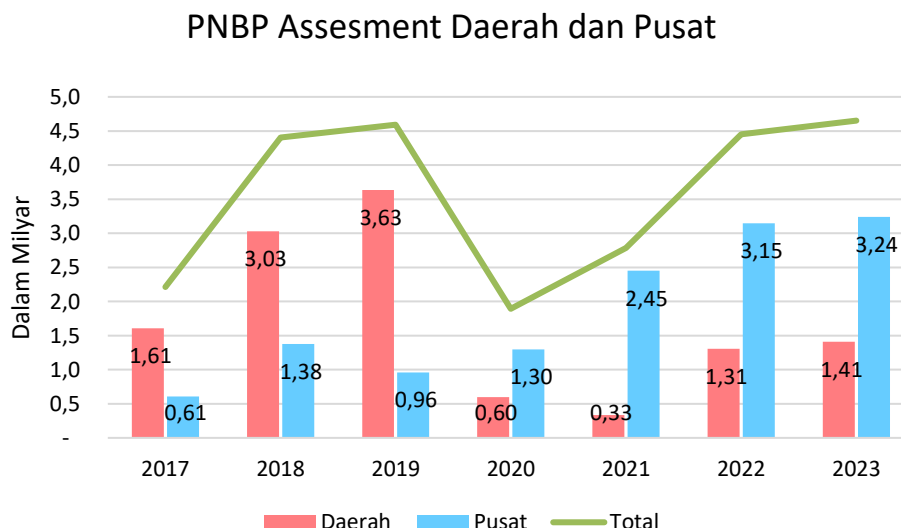
Sesuai dengan Perka BKN no. 36 tahun 2015 Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyelenggarakan seleksi pegawai berbasis teknologi informasi dan melaksanakan penilaian kompetensi pegawai. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai menyelenggarakan fungsi diantaranya :

- seleksi pegawai berbasis-teknologi informasi;
- fasilitasi seleksi pegawai berbasis teknologi informasi;
- penilaian kompetensi pegawai;
- fasilitasi penilaian kompetensi pegawai;

Keseluruhan fungsi tersebut merupakan sumber penerimaan Negara Bukan Pajak yang dituangkan dalam peraturan Pemerintah Nomor: 6. Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara. Untuk kegiatan *assesment center* dan ujian Sekolah kedinasan yang terbaru tahun 2024 bulan maret adalah peraturan Pemerintah Nomor: 2. Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara.

Dibawah ini merupakan pelaksanaan kegiatan tugas fungsi BKN dalam rentang tahun 2020-2023. Dua kegiatan yang dilaksanakan adalah :

#### 3.2.1. Pelaksanaan Penilaian Kompetensi



Grafik PNBP Kegiatan Penilaian Kompetensi

Pada kategori kegiatan pelaksanaan Penilaian kompetensi pada tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat penurunan yang signifikan, hal ini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang membatasi interaksi yang merupakan salah satu metode pelaksanaan Penilaian kompetensi. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan pendapatan pelaksanaan, hal ini disebabkan karena adanya perubahan strategi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi selama pandemi Covid-19. Dalam memberikan pelayanan penilaian potensi dan kompetensi, Puspenkom ASN telah menyiapkan instrument pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi berbasis online. Dengan adanya perubahan metode pelaksanaan ini, maka diperlukan waktu untuk menyiapkan simulasi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan secara online.

Peningkatan pemanfaatan fasilitas Penilaian kompetensi BKN terus meningkat pasca terjadinya pandemi. Proporsi pemanfaatan fasilitas penilaian kompetensi pada pemerintah daerah lebih besar daripada pemerintah pusat dalam kurun waktu 5 tahun hal ini menunjukkan bahwa dalam rangka mencapai target penerimaan pemerintah bukan pajak perlu di dukung dengan penyiapan sarana dan prasaran yang memadai, disisi lain terbitnya peraturan pemerintah tarif yang terbaru juga berdampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara dari pelaksanaan tugas *assessment center*.

Proporsi Peserta Penilaian Kompetensi 2017-2023

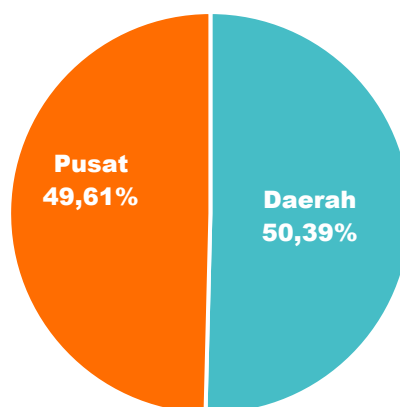
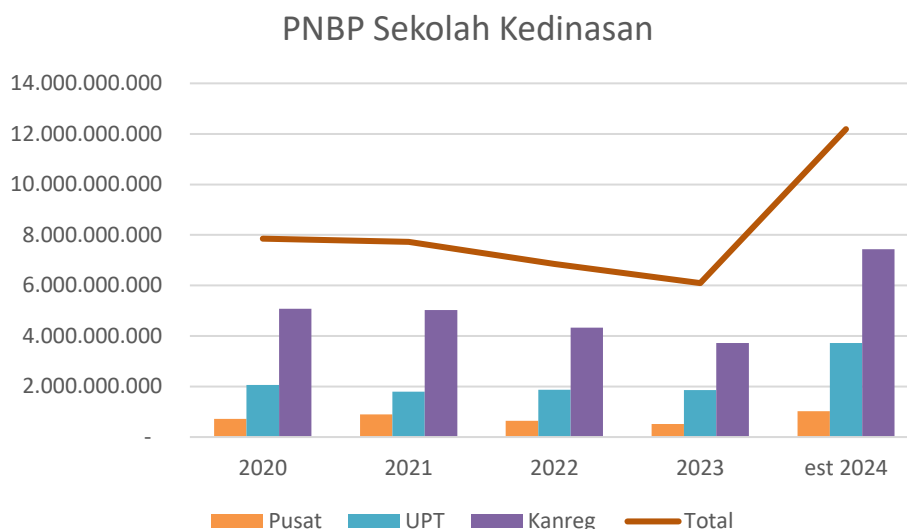


Diagram Peserta Penilaian Kompetensi tahun 2017 hingga 2023

### 3.2.2. Pelaksanaan Sekolah kedinasan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor: 2. Tahun 2024 yang terbaru memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan negara yang dihasilkan dari pelaksanaan ujian sekolah kedinasan yang merupakan salah satu tugas UPT. Perubahan tarif yang semula Rp 50.000,- mejnadi Rp 100.000,-. Diprediksi meningkatkan pendapatan negara sebesar 12M atau 2x lipat dari tahun 2023.



Grafik Jumlah Peserta pada Tahun 2020 hingga 2023

Dalam pelaksanaan tugas bidang seleksi ikatan dinas, kantor regional memegang peranan besar dengan mencatat pendepatan terbesar dalam kurun waktu 3 tahun. Kantor UPT dengan kepemilikan fasilitas yang sangat terbatas menempati posisi ke dua pada peringkat pendapatan PNBM dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut.

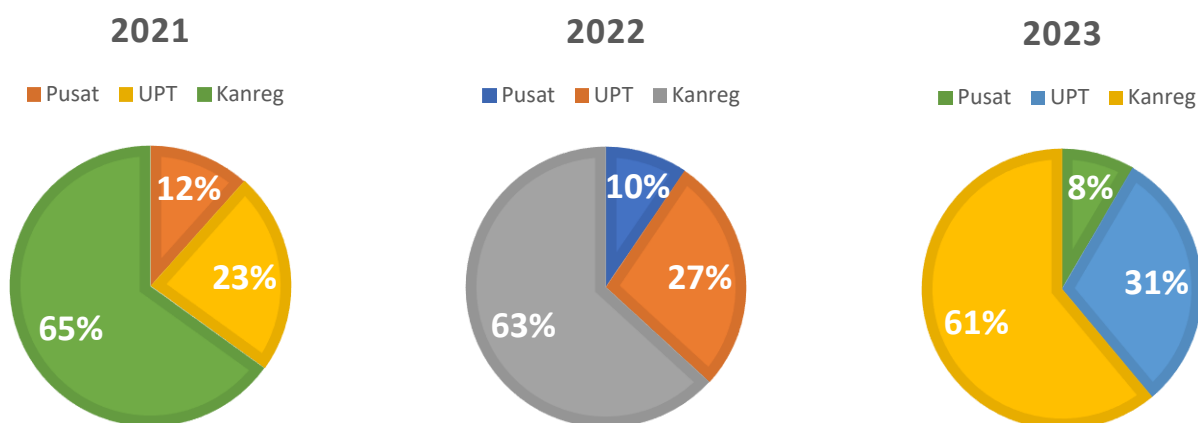


Diagram Pendapatan PNBM pada tahun 2021 hingga 2023



Berdasarkan diagram lingkaran proporsi pelaksanaan sekolah ikatan dinas dapat dilihat bahwa secara rata-rata Kantor UPT dengan keterbatasannya melaksanakan 27% proporsi dari keseluruhan jumlah tes yang dilaksanakan. Pada perjalanan waktu selama tiga tahun, terlihat peningkatan peran Kantor UPT secara terus menerus. Peningkatan peran UPT dalam pelaksanaan Ujian Ikatan Dinas ini perlu menjadi perhatian dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

### **3.3. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan memacu kegiatan ekonomi pada wilayah sekitar kantor Unit Pelayanan Kepegawaian (UPT) BKN**

Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya aktivitas disebuah kawasan akan menimbulkan terjadinya kegiatan ekonomi pada lingkungan sekitarnya. Pembangunan kantor Unit Pelayanan Kepegawaian (UPT) BKN di Bandung, Banjarbaru, Jambi dan Pangkal Pinang diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat disekitar kantor UPT.

Sebagai dasar estimasi perhitungan manfaat yang didapat masyarakat atas terbangunnya kantor UPT adalah kegiatan yang telah dilaksanakan di UPT Jambi pada tahun 2023. Sebanyak 11.000 peserta akan mengalokasikan belanja baik untuk makanan, transportasi dan kebutuhan lain pada saat pelaksanaan tes, sebanyak 17 lapangan kerja baru seperti Tenaga Keamanan, Pengemudi, dan Tenaga kebersihan akan bekerja dikantor UPT. Diperkirakan selama satu tahun operasional Kantor UPT untuk biaya pemeliharaan Gedung dan Peralatan memerlukan biaya sekitar Rp 300.000.000 rupiah dengan estimasi sebanyak 40% akan dialokasikan untuk biaya tenaga kerja baik tenaga kerja ahli maupun non ahli.

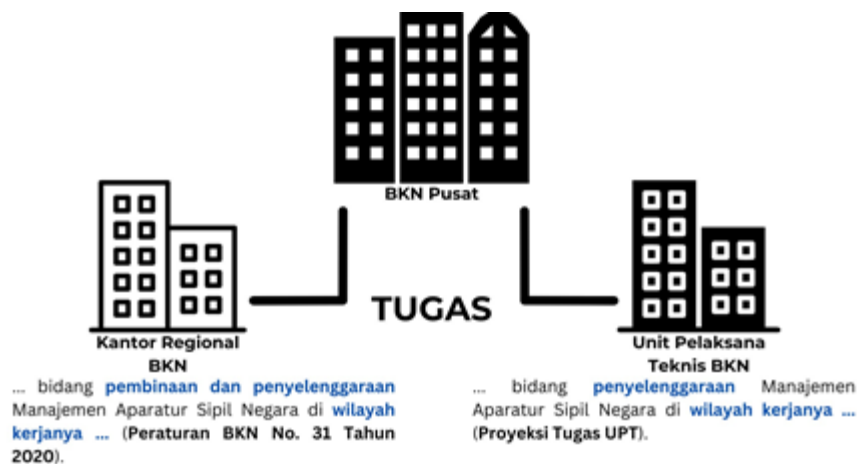
Kegiatan Ekonomi Masyarakat



Diagram Kegiatan Ekonomi Masyarakat

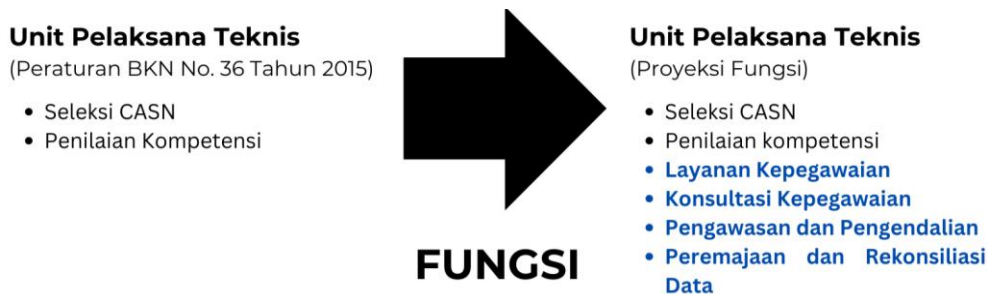
#### 4. Kajian Kelembagaan

Penguatan tugas dan fungsi UPT adalah salah satu langkah yang akan dilakukan dalam memberikan layanan berdampak kepada stakeholders. Pada Peraturan BKN No. 36 Tahun 2015, UPT hanya memiliki tugas untuk menyelenggarakan seleksi pegawai dan melaksanakan penilaian kompetensi pegawai. Hal inilah yang harus diubah karena sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini. Proyeksi tugas UPT kedepan akan melakukan penyelenggaraan manajemen ASN dalam hal ini ada layanan kepegawaian seperti layanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun, pembinaan dan pengendalian implementasi manajemen ASN. Berikut ini adalah gambaran tugas UPT BKN dalam bentuk infografis, sebagai berikut:



Gambar Tugas Unit Pelaksana Teknis BKN

Fungsi UPT terkait penyelenggaraan layanan kepegawaian merupakan penurunan fungsi dari BKN pusat yaitu Kedeputian Mutasi Kepegawaian. Layanan kepegawaian di UPT akan sangat membantu pelayanan terhadap stakeholders di wilayah kerja masing-masing UPT, yang sebelumnya hanya dilakukan Kantor Regional. Beberapa hal terkait layanan kepegawaian status dan kedudukan atau yang berdampak pada civil hukum tidak diturunkan ke UPT, karena nantinya proses penyelesaiannya hanya bisa dilakukan oleh Unit Kerja di BKN Pusat. Selain itu, perlu dipahami juga bahwa harus ada penambahan layanan yang tidak bisa terdigitalisasi karena sifatnya harus dilakukan pendampingan secara langsung.



Gambar Fungsi Unit Pelaksana Teknis BKN

Berikut ini penjelasan terkait layanan yang akan dilakukan di UPT:

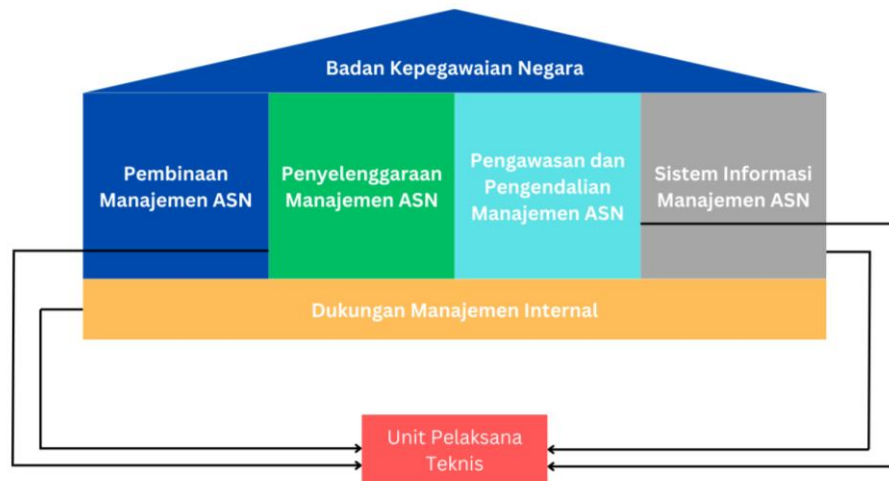
- Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara
- Penilaian Kompetensi
- Layanan Kepegawaian, diantaranya: pengadaan, kenaikan pangkat, perpindahan ASN, pengalihan ASN, perencanaan kebutuhan ASN, dan pensiun.
- Konsultasi Kepegawaian, Pendampingan Implementasi Manajemen ASN.
- Pengawasan dan Pengendalian, diantaranya: koordinasi pengawasan dan
- pengendalian NSPK Manajemen ASN, penyelesaian permasalahan kepegawaian, pelaksanaan asistensi pengukuran indeks NSPK, dan memastikan pelaksanaan sistem merit di instansi daerah.
- Peremajaan dan Rekonsiliasi Data

### **Kedudukan dan Keterkaitan UPT dengan Organisasi Induk**

Secara kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki kedudukan sebagai berikut:

- UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- UPT dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- Dalam hal sifat tugas UPT mencakup lintas unsur pelaksana, UPT Badan Kepegawaian Negara secara teknis berkoordinasi dengan Deputi sesuai bidang tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama.

Lebih jauh keterkaitan UPT dalam proses bisnis BKN digambarkan pada ilustrasi berikut:

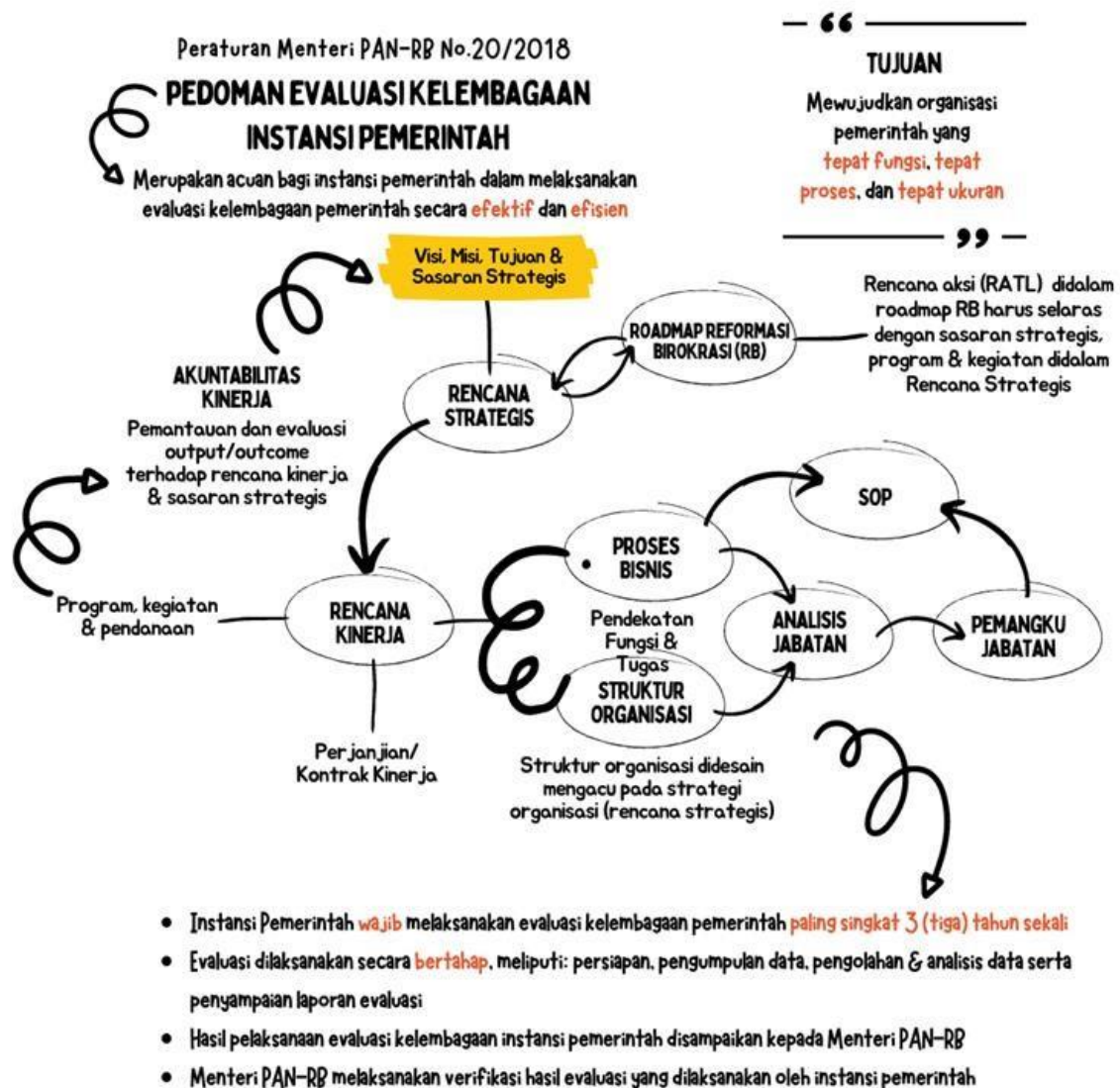


Gambar Turunan Proses Bisnis BKN Pusat

Pada dasarnya tugas dan fungsi UPT berada pada tingkatan output dan aktivitas yang lebih dalam pada ilustrasi proses bisnis di atas. UPT terlibat salah satunya dalam pilar penyelenggaraan manajemen ASN dimana UPT turut memberikan layanan kepegawaian ASN kepada stakeholder. Dalam memberikan layanan dan konsultasi kepegawaian, UPT berkoordinasi dengan unit kerja di bidang mutasi. Dalam melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data, UPT akan berkoordinasi dengan kedeputian atau unit kerja di bidang sistem informasi kepegawaian. Untuk pengawasan dan pengendalian, maka UPT akan berkoordinasi dengan unit kerja di bidang pengawasan dan pengendalian. Selain itu, dalam melaksanakan tugas substantif seperti fasilitasi seleksi, UPT berkoordinasi dengan unit kerja di bidang pengembangan sistem seleksi. Sedangkan dalam melaksanakan fasilitasi penilaian potensi dan kompetensi ASN, UPT berkoordinasi dengan unit kerja di bidang Penilaian Kompetensi ASN. Gambar Turunan Proses Bisnis BKN Pusat

Kehadiran Kantor Unit Pelayanan Kepegawaian (UPT) BKN di beberapa kota di provinsi sebagai Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi ASN adalah salah satu bentuk jalinan kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam setiap provinsi idealnya memiliki Kantor perwakilan BKN untuk mempermudah dan mempercepat layanan kepegawaian.





Layanan kepegawaian ini tidak hanya bersifat pengurusan administratif, akan tetapi termasuk juga kegiatan rekrutmen, pengawasan hingga pembinaan terhadap ASN di seluruh Indonesia. Kedepan tidak menutup kemungkinan UPT ini akan menjadi Kantor Regional sesuai dengan perubahan dan tuntutan kebutuhan.

Pada tahun 2021 BKN telah melaksanakan Evaluasi Kelembagaan sesuai dengan ketentuan Permenpan no 20 tahun 2018. Evaluasi Kelembagaan ini dilaksanakan sebagai dasar acuan lembaga Pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian struktur dan proses organisasi sesuai dengan visi misi dan tuntutan *stakeholder*.



Sesuai dengan Permenpan no 20 tahun 2018 evaluasi Kelembagaan melingkupi 2 dimensi yaitu :

### 1. Dimensi Struktur Organisasi

Dimensi Struktur organisasi terdiri dari subdimensi kompleksitas, formalitas dan sentralisasi. Subdimensi Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Pemisahan tugas dalam subdimensi kompleksitas diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu :

- Diferensiasi Horizontal* merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian dan sebagainya. Pada organisasi pemerintah, *diferensiasi horizontal* dipisahkan diantaranya berdasarkan :

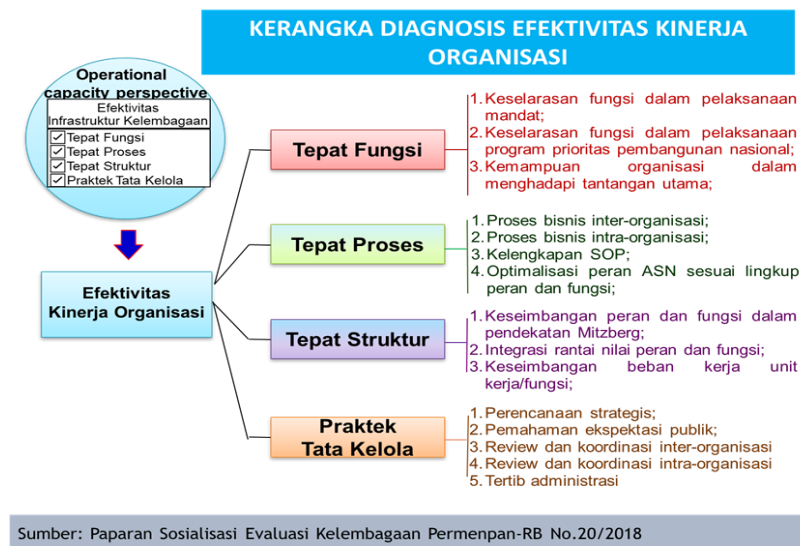
- a. visi dan misi pemerintah pusat atau daerah;
  - b. urusan pemerintahan yang diselenggarakan;
  - c. kewenangan yang dimiliki; dan
  - d. pengelompokkan bidang tugas organisasi.
- b) *Diferensiasi Vertikal* merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki didalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari *diferensiasi* ini adalah rentang kendali, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang di atasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan. Dalam praktek penataan organisasi pemerintah, perlu memperhatikan dimensi *diferensiasi vertikal* ini.
- c) *Diferensiasi Spasial* merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut. *Diferensiasi Spasial* merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penataan kelembagaan instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar.

## 2. Dimensi Proses Organisasi

Dimensi Proses Organisasi terdiri dari subdimensi *alignment*, *Governance & Compliance*, Perbaikan dan Peningkatan Proses, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi.

Berdasarkan Permenpan-RB no. 20 tahun 2018 diagnosis tingkat efektivitas kinerja organisasi ditinjau dengan 4 kriteria yaitu; tepat fungsi, tepat

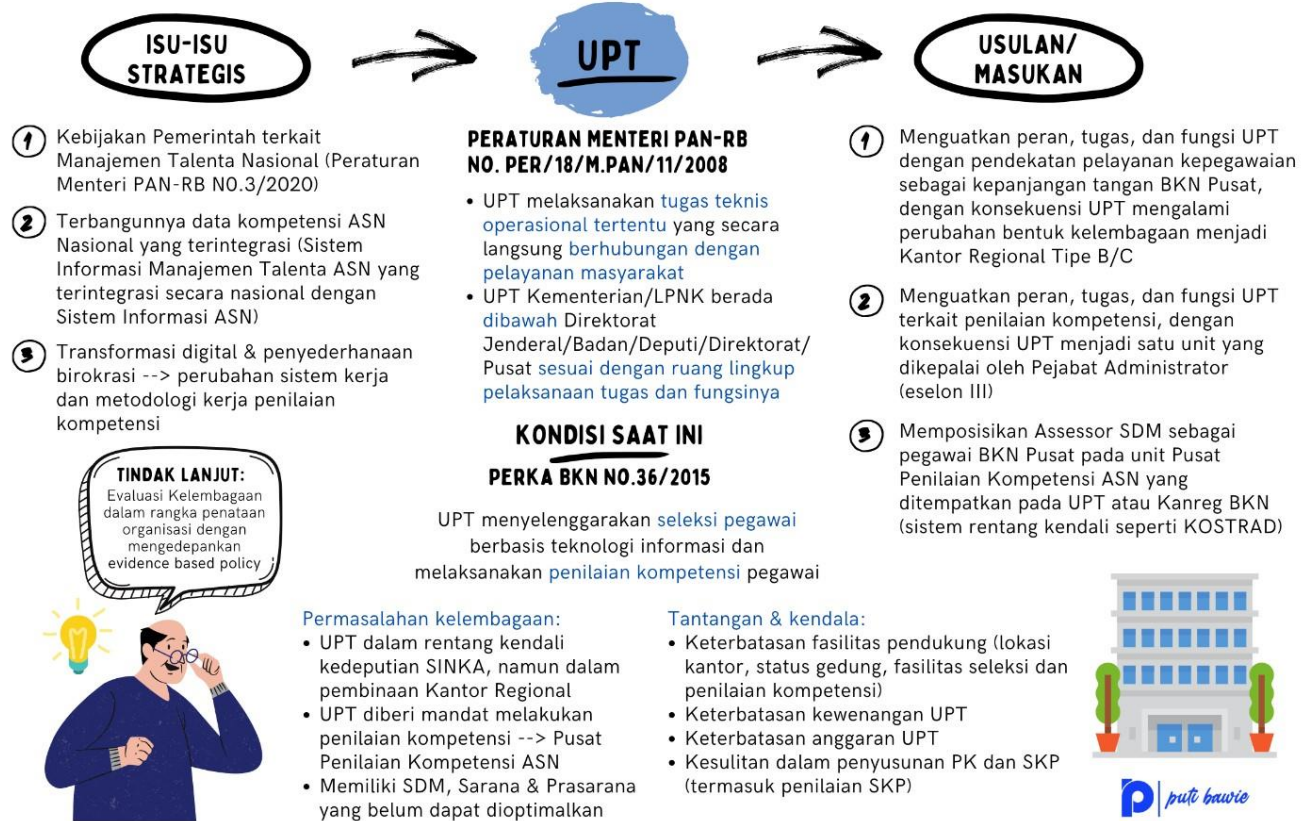
proses, tepat struktur dan praktek dan tata kelola. Penjelasan dan detail mengenai kriteria tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Dalam proses pelaksanaan evaluasi kelembagaan, BKN juga melakukan analisa tambahan sebagai data *complementary* untuk mendapatkan gambaran secara penuh mengenai kondisi organisasi dalam tinjauan kompleksitas pada kategori *deferensiasi Vertical* dan *spasial*. Berkaitan dengan tinjauan analisa kelembagaan beberapa analisa tambahan yang dilakukan diantaranya *SWOT analysis*, *FGD* pada kantor Reginal BKN dan Kantor UPT BKN. Hasil dari pelaksanaan analisis tersebut di atas adalah sebagai berikut:







Hasil dari evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB no.20 tahun 2018 yang memiliki keterkaitan dengan upaya pengembangan UPT adalah sebagai berikut:

| DIMENSI                          | SKOR               | Deviasi dari max |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Kompleksitas                     | 19,58              | 22%              |
| Formalisasi                      | 11,61              | 7%               |
| Sentralisasi                     | 11,93              | 5%               |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>43,12</b>       | <b>14%</b>       |
| Alignment                        | 10                 | 0%               |
| Governance and Compliance        | 10                 | 0%               |
| Perbaikan dan Peningkatan Proses | 6,25               | 38%              |
| Manajemen Risiko                 | 7,917              | 21%              |
| Teknologi Organisasi IT          | 9                  | 10%              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>43,17</b>       | <b>14%</b>       |
| <b>Peringkat Komposit</b>        | <b>86,28896104</b> |                  |

| P-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. |                |
| Kondisi Dimensi Struktur dan Proses                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sangat efektif |
| Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                              | Sangat tinggi  |
| Kekurangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -              |



**DIMENSI : PROSES ORGANISASI**  
**SUBDIMENSI: PERBAIKAN & PENINGKATAN PROSES**

- Struktur organisasi BKN saat ini sudah mengakomodir fungsi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BKN Nomor 29 dan Nomor 30 Tahun 2020.
- Dimensi Struktur Organisasi dengan subdimensi Kompleksitas dari hasil analisis data terdapat pada P-5 hal tersebut mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Kedudukan, tugas, fungsi, dan besaran unit organisasi menunjukkan tidak melebihi kebutuhan organisasi serta tidak adanya indikasi tumpang tindih.
- Struktur yang ada saat ini sudah memperlihatkan adanya keseimbangan peran dan fungsi dalam hal kewenangan pengambilan keputusan mulai dari pimpinan utama instansi hingga ke pimpinan organisasi tingkat bawah.
- Kondisi saat ini keberadaan Kantor Regional dan Kantor UPT sudah mendukung secara sinergis pencapaian tujuan organisasi.
- Berdasarkan *SWOT Analysis* terdapat kelemahan yang perlu menjadi perhatian yaitu terkait *cascading* kegiatan dan target kinerja antara UPT dan Kantor regional dan BKN Pusat, salah satu faktor yang mendasari hal tersebut juga diantaranya adalah keterbatasan sarana-prasarana.
- Sesuai dengan Perka BKN no. 36 tahun 2015 Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyelenggarakan seleksi pegawai berbasis teknologi informasi dan melaksanakan penilaian kompetensi pegawai. Kondisi saat ini kantor UPT hanya tersedia fasilitas untuk seleksi pegawai berbasis TI, sedangkan fasilitas untuk penilaian kompetensi tidak tersedia, kondisi ini berdampak pada perbedaan penetapan target kegiatan dan kinerja antara Kantor Pusat dan Kantor Regional dan UPT BKN.
- Hasil FGD yang dilaksanakan PPMASN dengan kantor Regional BKN menggambarkan salah satu kendala utama terdapat pada pemenuhan

sarana dan prasarana, disisi lain tuntutan pelaksanaan fungsi penilaian kompetensi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat tinggi padahal fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tidak tersedia di kantor UPT.

- Terkait dengan Kantor Regional dan UPT sudah mendukung secara sinergis tercapainya tujuan organisasi namun perlu segera direviu kesesuaian desain organisasi saat ini dengan tantangan adanya transformasi digital, sistem merit dan sistem manajemen kinerja berorientasi hasil.

## 5. Kajian Risiko

Sejak pertama kali sistem CAT BKN digunakan secara nasional untuk penyelenggaraan seleksi CPNS pada tahun 2017, berbagai dinamika permasalahan pada pelaksanaan menjadi pembelajaran dan dasar pengembangan sistem seleksi yang lebih baik. Sering kali permasalahan timbul di lokasi yang merupakan lokasi sewa/bukan milik BKN.

Beberapa faktor yang menjadi pemicu dominan permasalahan di luar kendali BKN pada lokasi diluar kantor BKN dan UPT diantaranya adalah :

- a. Keamanan Peralatan Teknologi Informasi (sewa);
- b. Keterbatasan waktu dalam proses instalasi dan konfigurasi peralatan;
- c. Kondisi Gedung yang tidak memadai (*security*, aksesibilitas, sirkulasi, kenyamanan).

Permasalahan kondisi gedung yang tidak memadai sering terjadi pada titik lokasi diluar kantor BKN yaitu titik lokasi tambahan/sewa. Permasalahan ini memicu beberapa permasalahan lain bahkan berdampak serius terhadap kredibilitas sistem seleksi CAT, karena Gedung merupakan komponen utama dalam fasilitas CAT.

Permasalahan *Remote akses* yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini diantaranya disebabkan oleh kondisi Gedung bangunan yang tidak memiliki standar keamanan seperti CCTV dan akses kontrol, disisi lain karena bukan Gedung milik BKN sehingga BKN tidak memiliki hak untuk pengelolaan keamanan secara penuh. Adanya celah keamanan dalam Gedung memungkinkan pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab untuk



memanfaatkan celah tersebut yaitu dengan menanamkan *software remote* akses pada komputer, akibatnya kredibilitas CAT BKN menjadi taruhannya.

Secara umum, potensi permasalahan tersebut dapat diatasi apabila BKN secara simultan dapat memiliki kantor UPT di seluruh wilayah Indonesia, dimana bangunan gedung telah direncanakan secara matang baik dari sisi aksesibilitas peserta tes, sirkulasi peserta tes, standar keamanan yang tinggi dan pengelolaan yang utuh oleh BKN.

Gedung UPT merupakan bangunan yang memiliki spesifikasi khusus, pola sirkulasi peserta dan kebutuhan ruangan telah dituangkan dalam SOP pelaksanaan seleksi CASN dengan tujuan untuk dapat mengeliminasi potensi timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan.



beberapa komputer tes tidak dapat menyala, dan terjadi kebakaran instalasi. Permasalahan lain yang terjadi lokasi adalah terjadinya pemadaman listrik, dimana Gedung yang disewa tidak mampu menyediakan genset yang dapat menyuplai listrik kebutuhan tes sehingga mengakibatkan tes tertunda.

Pada tahun 2017 ketika BKN pertama kali melaksanakan seleksi CASN menggunakan CAT secara menyeluruh, pengadaan fasilitas tambahan dilaksanakan melalui sewa baik berupa gedung, instalasi listrik, instalasi data dan juga laptop. Permasalahan timbul di beberapa tempat diantaranya akibat pekerjaan instalasi listrik yang tidak memenuhi spesifikasi oleh penyedia jasa maka



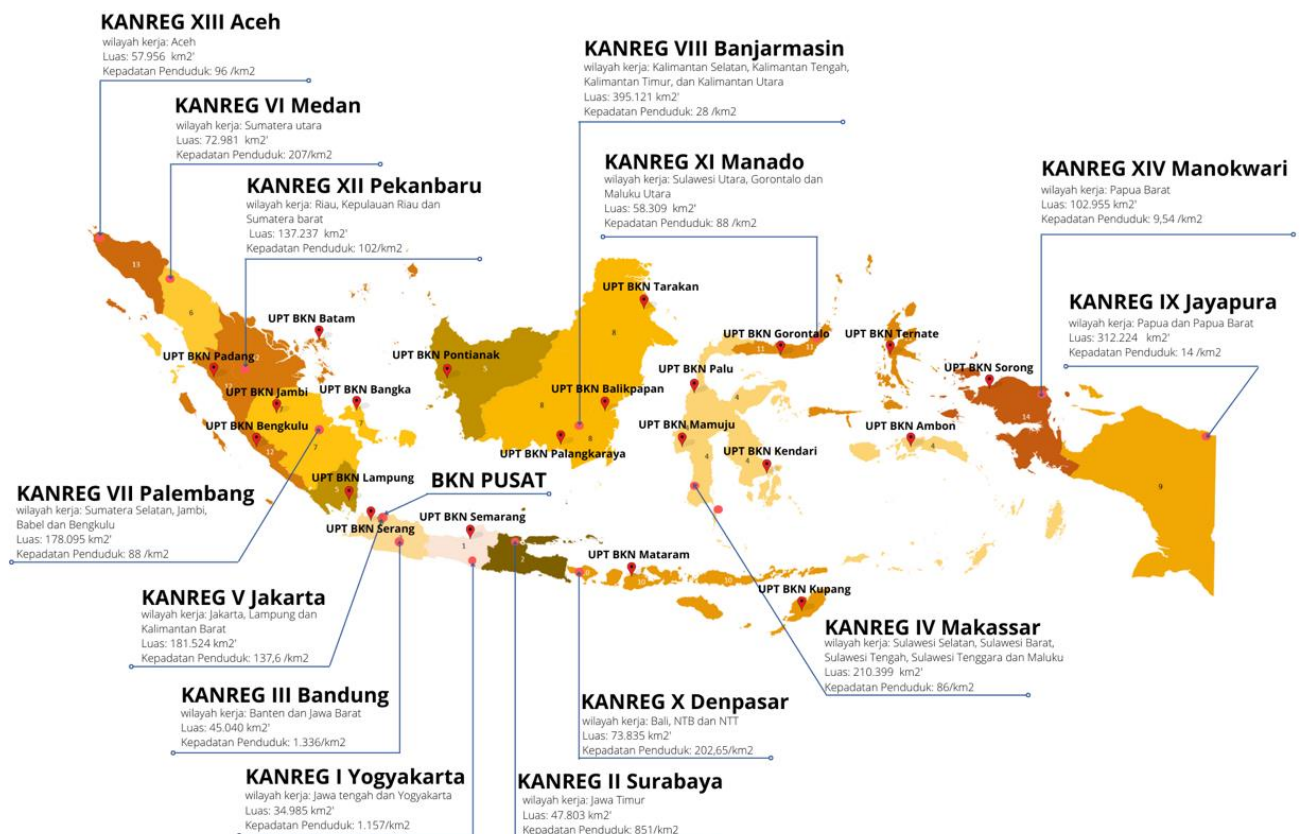




Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di satu lokasi tetapi terjadi di beberapa lokasi tes. Keseluruhan permasalahan diatas dapat diatasi apabila BKN memiliki fasilitas tes (kantor UPT) sendiri, kebutuhan terhadap instalasi listrik dan kebutuhan listrik cadangan dapat direncanakan dengan matang.

## 6. Kajian Potensi Pemanfaatan

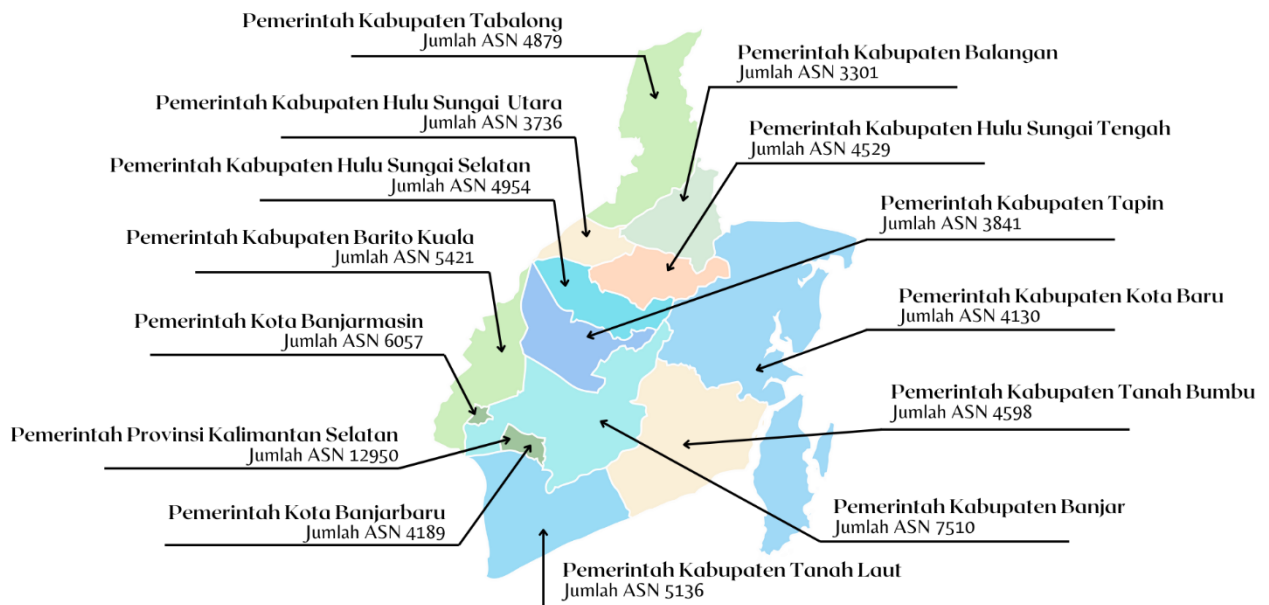
Sampai dengan saat ini BKN memiliki 14 Kantor Regional dan 1 Kantor UPT yang memenuhi standar kriteria pemenuhan sarana prasarana *Assessment Center* dan CAT yang tersebar di seluruh Indonesia.



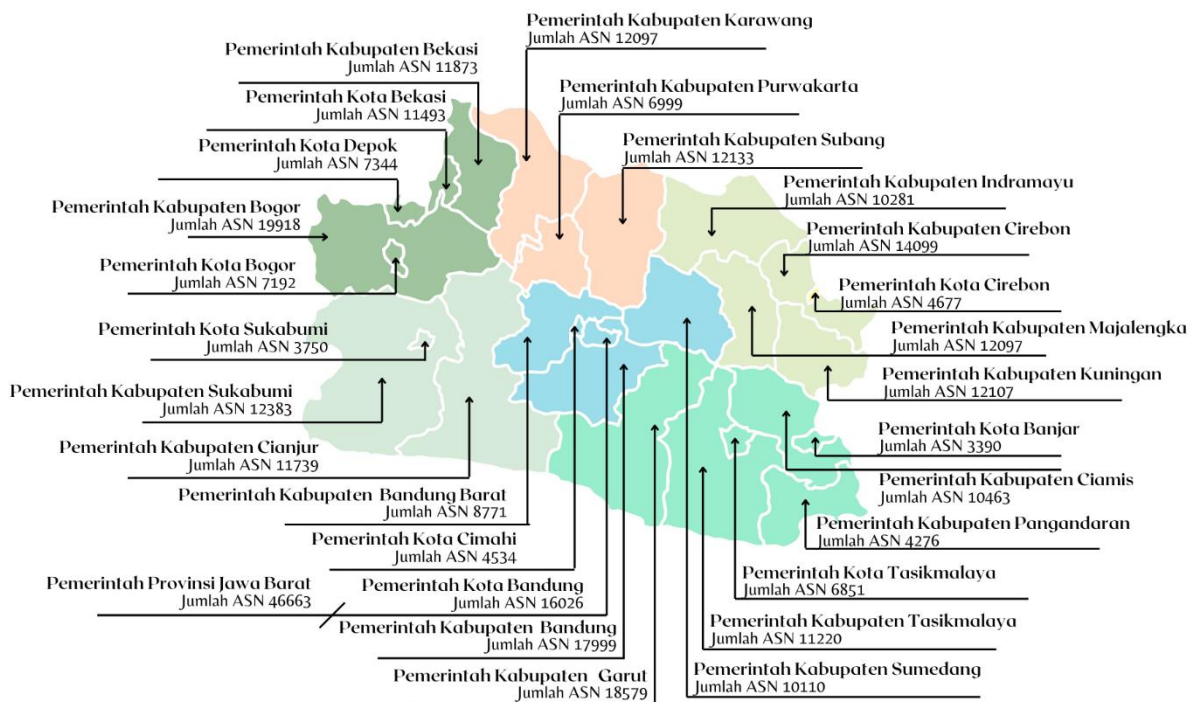
Gambar diatas merupakan lokasi Kantor BKN termasuk kantor Regional dan Kantor UPT BKN yang Sebagian besar merupakan fasilitas yang dipinjamkan oleh pemerintah daerah dengan keterbatasan sarana dan

prasarana dan belum dapat memenuhi standar kebutuhan yang mendukung tugas fungsi BKN terutama pada lokasi UPT.

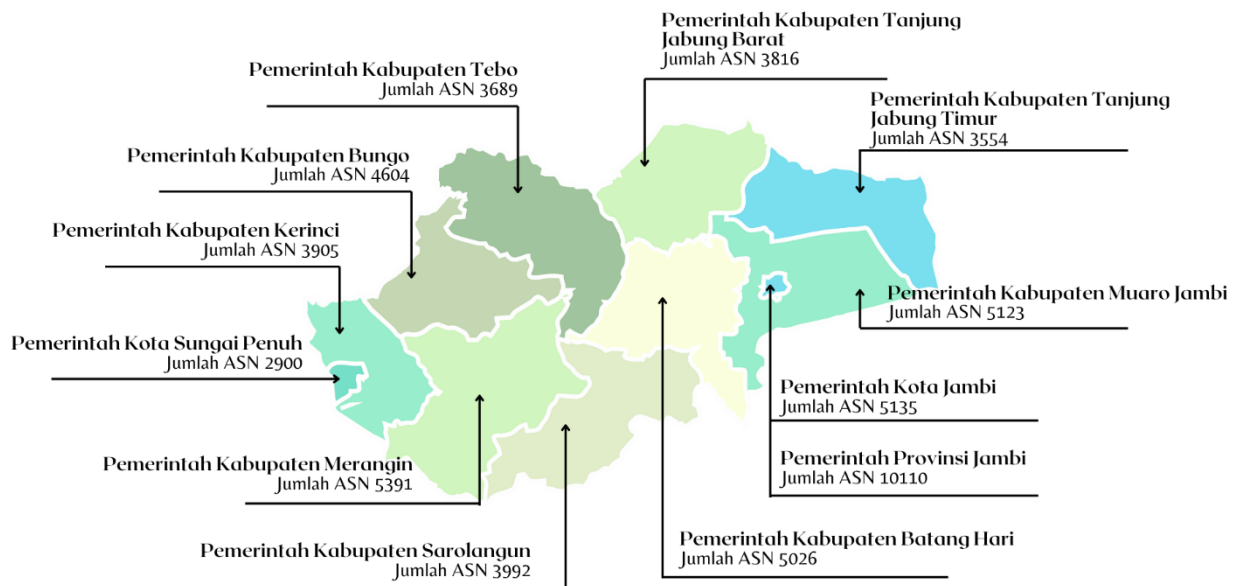
Sekilas, dengan melihat gambar diatas sepertinya BKN telah memiliki fasilitas yang tersebar merata dengan mengesampingkan standar pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, sebenarnya hal itu jauh dari kecukupan mengingat dalam pelaksanaan fungsi seleksi peserta berasal dari seluruh wilayah Indonesia.



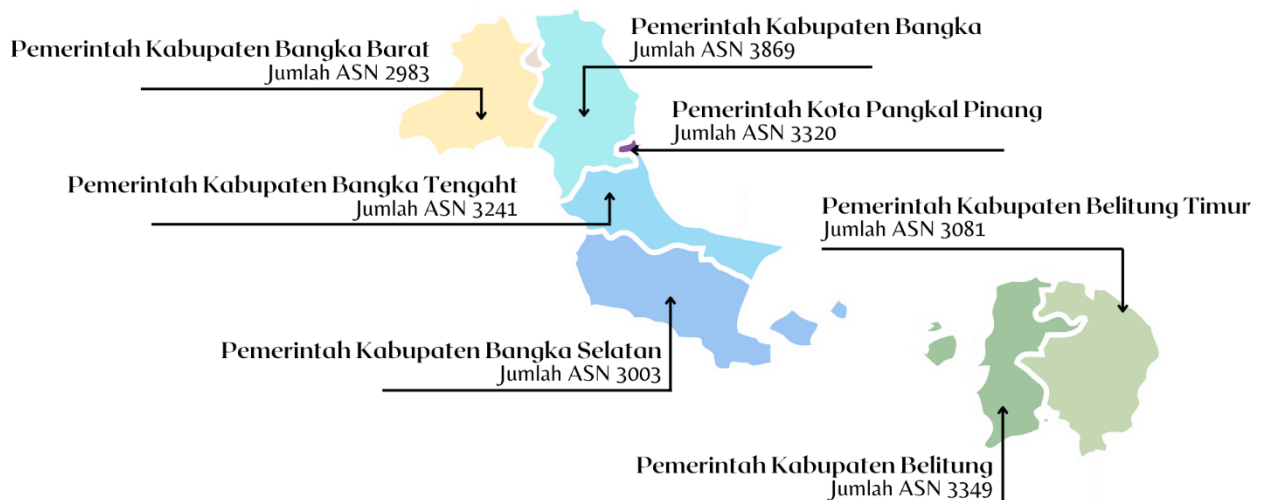
**Gambar Jumlah ASN Provinsi Kalimantan Selatan.**



**Gambar Jumlah ASN Provinsi Jawa Barat.**



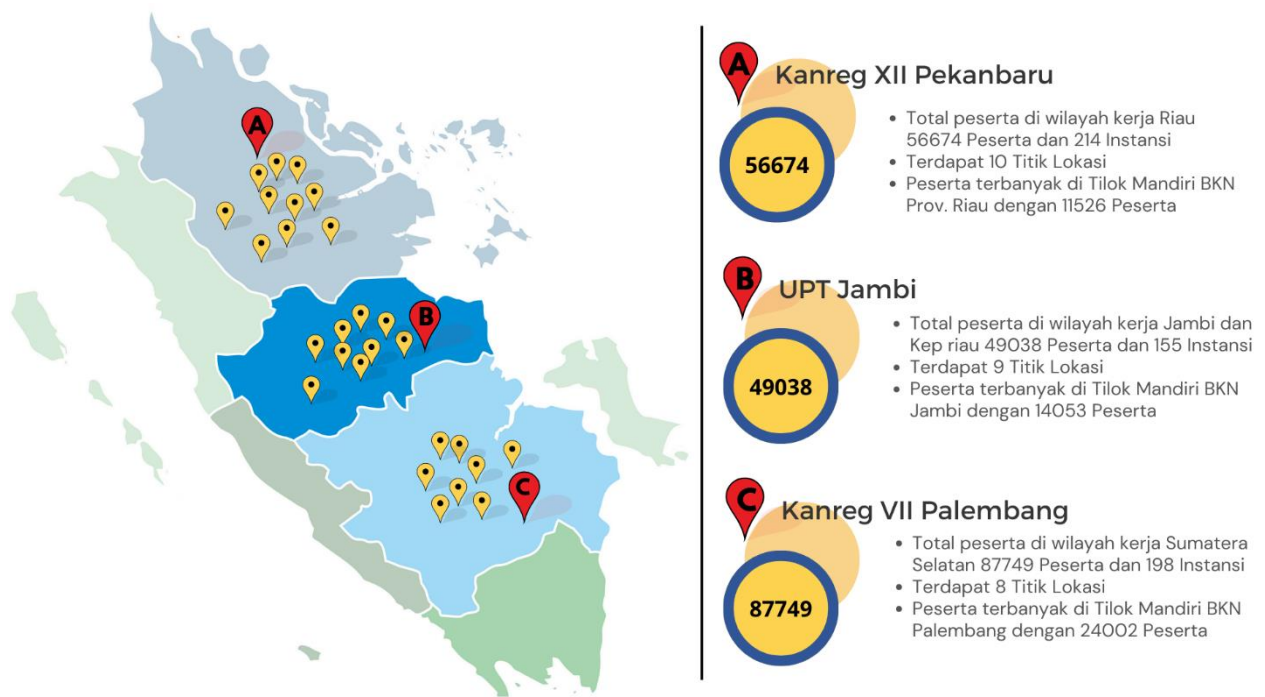
**Gambar Jumlah ASN Provinsi Jambi.**



**Gambar Jumlah ASN Provinsi Bangka Belitung.**

Upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat oleh ASN menjadi prioritas utama pemerintah, selain peningkatan kompetensi ASN melalui seleksi yang berkualitas dan pelaksanaan program penilaian kompetensi yang terstruktur, pemenuhan pelayanan atas hak-hak ASN perlu menjadi prioritas.

Permasalahan jarak menjadi isu utama dalam usaha pemenuhan pelayanan kepada ASN, disisi lain dinamika permasalahan kepegawaian yang terjadi mengharuskan intensitas koordinasi yang tinggi demi menyelesaikan permasalahan kepegawai, dengan adanya UPT diharapkan dapat mendekatkan pelayanan BKN.



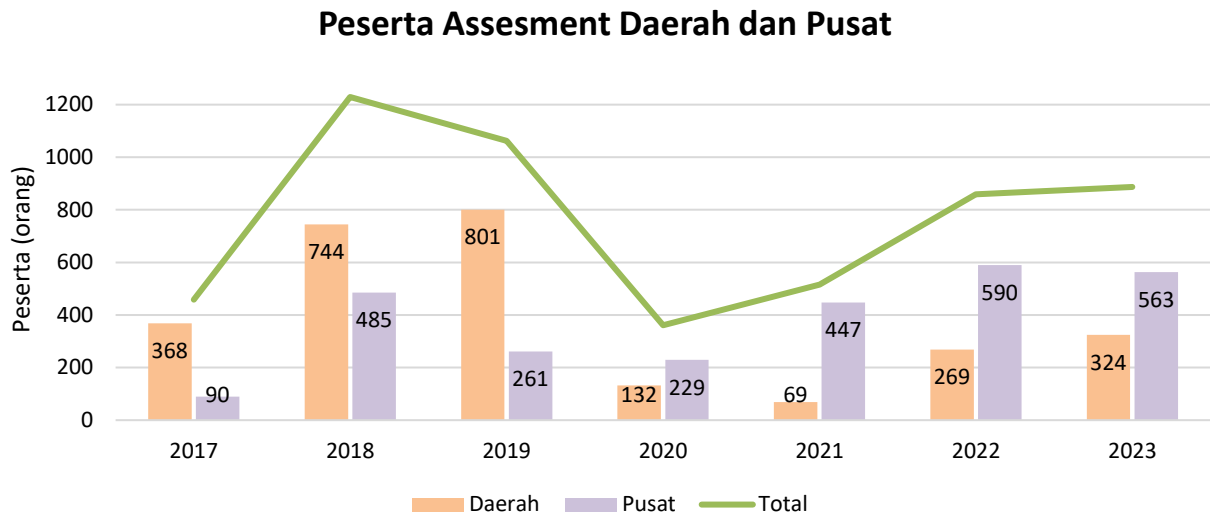
Salah satu contoh gambaran pelayanan UPT pada kategori Seleksi CASN adalah Provinsi Jambi. Provinsi Jambi, terletak diantara perwakilan BKN yaitu kantor Regional Palembang dan Pekanbaru dengan jarak yang *equal*, 12 jam darat atau dengan perjalanan udara. Kondisi saat ini kantor UPT BKN merupakan kantor pinjam pakai dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas, dalam perkembangannya Pemerintah provinsi telah memberikan hibah tanah yang siap bangun. Jarak dan waktu menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas kedua instansi. *Urgency* dan potensi manfaat dibangunnya perwakilan BKN di Jambi diantaranya:

- Efisiensi penggunaan anggaran baik pemerintah pusat maupun daerah dengan berkurangnya alokasi perjalanan dinas terkait pelayanan kepegawaian;
- Dengan jumlah penduduk sekitar 3,7 juta jiwa pada akhir 2023, peningkatan pelayanan kepegawaian kepada ASN yang didalamnya melingkupi pengadaan, peningkatan kompetensi melalui Assessment Center secara langsung akan mampu meningkatkan kapabilitas ASN dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
- Permasalahan kepegawaian yang mungkin timbul dapat diselesaikan dengan efektif tanpa adanya kendala jarak dan waktu.



- Secara umum, dengan adanya UPT Jambi, masyarakat umum sangat terbantu dengan adanya fasilitas Seleksi CASN yang memadai dan memiliki lokasi yang strategis.

Pada grafik dibawah ini dapat dilihat pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi selama 7 tahun terakhir dan Grafik pelaksanaan kegiatan Tes Ikatan Dinas 3 tahun terakhir.

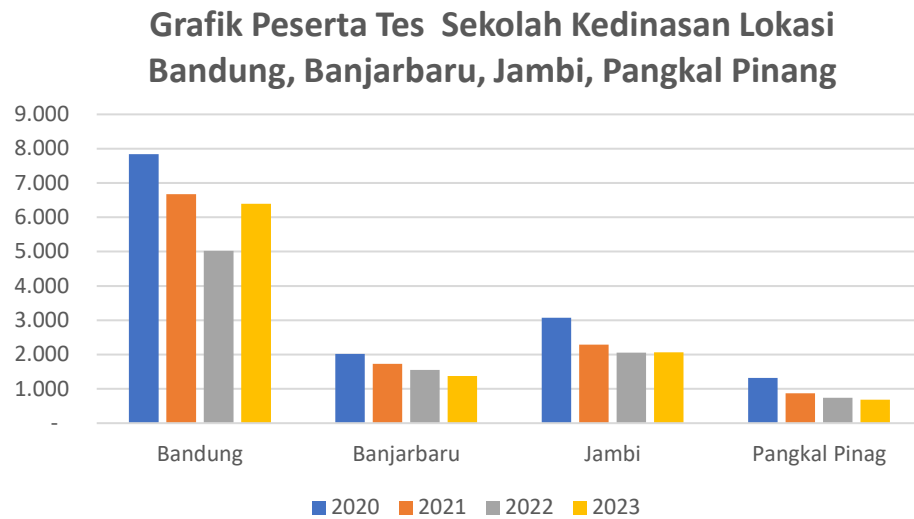


Grafik Peserta Assesment Daerah dan Pusat

Dibawah ini merupakan kegiatan pelaksanaan tes ikatan dinas pada kantor UPT yang diajukan untuk pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana pada kurun waktu 3 tahun terakhir.



Grafik Peserta Tes Sekolah Kedinasan



Grafik Peserta Tes Sekolah Kedinasan

Sekretaris Utama  
Badan Kepegawaian Negara

±